



**ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI KECURANGAN (*FRAUD*)
DAN MORALITAS INDIVIDU SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

(Survei pada Desa di Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Oleh

Nurikke Agus Fitriani

160810301103

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS JEMBER

2020



**ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI KECURANGAN (*FRAUD*)
DAN MORALITAS INDIVIDU SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

(Survei pada Desa di Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana

Oleh

Nurikke Agus Fitriani

160810301103

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2020

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S Ar’rad : 11)

“Man Jadda, Wajada.”

“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil.”

(Pepatah Arah)

“Hidup ini seperti secangkir kopi. Dimana pahit dan manis melebur, bertemu dalam kehangatan”

(Dee Lestari)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurikke Agus Fitriani

NIM : 160810301103

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI KECURANGAN (*FRAUD*) DAN MORALITAS INDIVIDU SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Survei pada Desa di Kabupaten Jember)” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Januari 2020

Yang menyatakan

Nurikke Agus Fitriani

NIM 160810301103

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Faktor Yang Memengaruhi Kecurangan (*Fraud*)
Dan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderating
(Survei pada Desa di Kabupaten Jember)

Nama Mahasiswa : Nurikke Agus Fitriani

NIM : 160810301103

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 14 Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Kartika, S.E., M.Sc., Ak.
NIP. 19820207 200812 2 002

Hendrawan Santosa Putra, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19740506 200212 1 006

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Agung Budi Sulisty, S.E., M.Si., Ak.
NIP 19780927 200112 1 002

SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI KECURANGAN (*FRAUD*)
DAN MORALITAS INDIVIDU SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Survei Pada Desa Di Kabupaten Jember)**

Oleh

Nurikke Agus Fitriani

NIM 160810301103

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Kartika, S.E., M.Sc., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Hendrawan Santosa Putra S.E., M.Si., Ak.

PENGESAHAN

JUDUL TUGAS AKHIR

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI KECURANGAN (*FRAUD*)
DAN MORALITAS INDIVIDU SEBAGAI VARIABEL MODERATING
(Survei pada Desa di Kabupaten Jember)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Nurikke Agus Fitriani
NIM : 160810301103
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Strata I Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

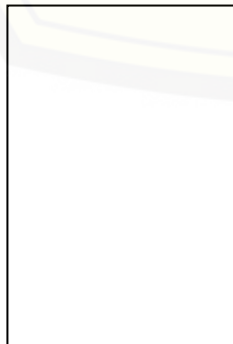
23 Januari 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Strata (S1) Program Studi Strata I Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

SUSUNAN TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Wahyu Agus W., S.E., M.Sc., Ak. (.....)
NIP. 198308102006041001
Sekretaris : Bunga Maharani, S.E., M.SA. (.....)
NIP. 198503012010122005
Anggota : Arie Rahayu Hariani, S.E., M.Sc. CSRS. (.....)
NIP. 760017225

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember



Dr. Muhammad Miqdad., SE., M.M., Ak
NIP. 197107 27199512 1001

Nurikke Agus Fitriani

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang memengaruhi kecurangan (*fraud*) dan moralitas individu sebagai variabel moderating (survei pada desa di Kabupaten Jember). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa di Wilayah Pemerintah Desa Kecamatan Sukorambi, Balung dan Puger di Kabupaten Jember. Sampel penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala tata usaha, kepala seksi pelayanan umum, kepala seksi kesejahteraan rakyat dan kepala seksi pemerintahan dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Balung dan Kecamatan Puger. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria dari pegawai pemerintahan yang telah bekerja lebih dari satu tahun, tujuannya karena memiliki kewenangan serta memiliki pemahaman yang lebih terkait kondisi desa. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap kecurangan, sedangkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecurangan. Moralitas individu mampu memoderasi pengaruh SPIP dan komitmen organisasi terhadap kecurangan. Maka dapat disimpulkan bahwa SPIP dan komitmen organisasi dapat mengurangi kecurangan dan moralitas individu dapat memperkuat pengaruh SPIP dan komitmen organisasi dalam mengurangi kecurangan.

Kata Kunci: Kompensasi, SPIP, Komitmen Organisasi, Kompetensi, Moralitas, dan Kecurangan.

Nurikke Agus Fitriani

Accounting Department, Faculty Of Economic and Business, Jember University

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence fraud and individual morality as moderating variables (case studies in villages in Jember Regency). This research uses quantitative research. The population in this study is the village apparatus in the Village Government District of Sukorambi, Balung and Puger Districts in Jember Regency. The sample of this study consisted of the village head, village secretary, head of financial affairs, head of planning affairs, head of administration, head of the public service section, head of the people's welfare section and heads of government sections from 3 districts namely Sukorambi District, Balung District and Puger District. The technique used in sampling is to use purposive sampling with criteria from government employees who have worked for more than one year, the goal being to have authority and to have a more understanding related to village conditions. The data analysis method used is multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The results of this study indicate that the suitability of compensation and competence does not affect fraud, while the government internal control system (SPIP) and organizational commitment affect fraud. Individual morality is able to moderate the influence of SPIP and organizational commitment to fraud. It can be concluded that SPIP and organizational commitment can reduce fraud and individual morality can strengthen the influence of SPIP and organizational commitment in reducing fraud.

Keywords: *Fraud, Compensation, Competence, Morality, Organizational Commitment, and SPIP*

RINGKASAN

ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI KECURANGAN (*FRAUD*) DAN MORALITAS INDIVIDU SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Survei pada Desa di Kabupaten Jember). Nurikke Agus Fitriani; 160810301103; 115 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Kecurangan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik individu maupun berkelompok secara sengaja yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Berdasarkan survei *fraud* Indonesia tahun 2016 yang dilakukan oleh ACFE yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pencegahan Kejahatan Kerah Putih (P3K2P) STIE Perbanas Surabaya menyatakan bahwa *fraud* yang paling banyak ditemui di Indonesia adalah korupsi. Sepanjang tahun 2015-2018 rata-rata kasus dugaan korupsi yang ditangani sebanyak 392 kasus per tahun.

Berdasarkan data yang dirilis ICW menunjukkan terdapat 5 sektor dengan kasus korupsi terbanyak sepanjang 2017, dengan peringkat pertama yakni anggaran desa dengan jumlah 98 kasus dan total kerugian negara sebesar Rp 39,3 Miliar, dimana terdapat 30 kepala daerah menjadi tersangka korupsi. Sejak adanya ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, hingga UU No. 23 Tahun 2014 terkait adanya penyerahan kekuasaan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat yang disebut desentralisasi. Pelimpahan kekuasaan ini memberikan dampak yang positif karena pemerintah pusat sudah menyerahkan kewenangannya agar pemerintah daerah dapat mengembangkan daerahnya sesuai dengan kondisi lingkungan secara mandiri, dengan harapan akan memajukan dan mensejahterakan pembangunan daerah. Namun nyatanya kurang dapat dijalankan dengan baik, hal ini ditunjukkan dari hasil yang ditunjukkan oleh ICW yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah membekuk 29 kepala daerah terkait tangkap tangan (OTT). Sepanjang tahun 2004 sampai tahun

2018 KPK telah membekuk sebanyak 104 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dan pada tahun 2018 tergolong tinggi kepala daerah yang diringkus KPK.

Data yang diperoleh dari ICW menyatakan bahwa kasus korupsi terkait dengan anggaran desa sebesar 252 kasus sejak tahun 2015 hingga 2018. Hal tersebut, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 107,7 miliar (jawapos.com 2019 (diakses 27 November 2019)). Pemerintah Desa Kabupaten Jember juga terlibat dalam beberapa kasus, diantaranya: 1) Mantan Kades Balung Kidul dipolisikan karena adanya indikasi penyelewangan TKD hingga penyertaan modal BUMDesa dalam SPJ yang sebenarnya tidak ada pengurusnya (radarjember.id 2019 diakses pada 19 September 2019). 2) Adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh mantan Kades Curahlele, Kecamatan Balung, Jember berupa tanah kas desa (sorottransx.com 2019 diakses pada 19 September 2019). 3) Dugaan perangkat desa telah melakukan korupsi berupa pelaksanaan program pembangunan sarana infrastruktur ADD tahun 2016 senilai 1 Miliar di Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi (rri.co.id 2016 diakses pada 24 April 2019), 4) Kepala Desa Wringintelu Kecamatan Puger, menjadi tersangka kasus korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana alokasi dana desa dan tunjangan kinerja daerah tahun anggaran 2013-2015, dan kerugian negara yang ditanggung dalam kasus ini sebesar Rp 511.259.120 (nasional.kompas.com 2018 diakses pada 22 September 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris terkait, dengan menggali persepsi perangkat desa di Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Balung, dan Kecamatan Puger Kabupaten Jember terkait terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan dan faktor-faktor yang memengaruhinya dengan menggunakan metode pemilihan sampel (*purposive sampling*) dengan kriteria tertentu. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian intern pemerintah, komitmen organisasi, kompetensi dan moralitas individu sebagai variabel moderating. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang menjabat sebagai kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan

keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala tata usaha, kepala seksi pelayanan umum, kepala seksi kesejahteraan rakyat dan kepala seksi pemerintahan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden yaitu perangkat desa di Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Balung, dan Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan di sektor pemerintahan, sedangkan kesesuaian kompensasi dan kompetensi tidak berpengaruh terhadap adanya kecurangan di sektor pemerintahan. Selain itu, moralitas individu dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan komitmen organisasi terhadap kecurangan di sektor pemerintahan. Sedangkan moralitas individu tidak dapat memoderasi pengaruh kesesuaian kompensasi dan kompetensi terhadap kecurangan di sektor pemerintahan.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Faktor Yang Memengaruhi Kecurangan (*Fraud*) Dan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderating (Survei pada Desa di Kabupaten Jember)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
2. Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
3. Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Taufik Kurrohman, S.E., M.SA., Ak., dan Dewi Ayu Puspita, S.E., M.SA., Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Kartika, S.E., M.Sc., Ak., selaku Dosen Pembimbing I dan Hendrawan Santoso Putra, S.E., M.Sc selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian serta selalu sabar membimbing dan memberikan arahan dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Akuntansi yang telah memberikan ilmu mengenai akuntansi;
7. Orang tua yang saya banggakan bapak Agus Mustofa dan ibu Dwi Anik yang selalu memberikan semangat dan doa yang tak pernah putus hingga awal kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini;

8. Mochamad Nur Hidayatullah yang selalu memberikan semangat dan membantu tugas akhir sejak awal, pengambilan data, hingga terselesaikannya skripsi ini;
9. Teman-teman seperjuangan yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat Dian Rismayasari, Leonita Catherine Wijaya, Vika Dwi, Sophia Adnani, Alya Arzia, Cahya Fitriana, Triska Maulidya, dan Qotrunnada Charisa;
10. Teman-teman akuntansi angkatan 2016 dan kakak-kakak serta adik-adik Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA) yang telah memberikan warna-warni kehidupan kampus saat proses perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini;
11. Bapak dan ibu perangkat desa dari Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Balung dan Kecamatan Puger yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi responden guna pengambilan dan pengumpulan data untuk proses penelitian;
12. Semua pihak yang membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan khususnya pada pembaca.

Jember, 14 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN JUDUL PEMBIMBING	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
RINGKASAN	ix
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	2
2.1 Teori Atribusi.....	2
2.2 Teori <i>Good Corporate Governance</i>	2
2.3 Teori <i>Fraud Diamond</i>	11
2.3.1 Tekanan (<i>Pressure</i>)	12
2.3.1.1 Kesesuaian Kompensasi	13
2.3.2 Peluang (<i>Opportunity</i>).....	14
2.3.2.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	14
2.3.3 Rasionalisasi (<i>Razionalitation</i>).....	15
2.3.3.1 Komitmen Organisasi	15
2.3.4 Kemampuan (<i>Capability</i>).....	16

2.3.4.1 Kompetensi	17
2.4 Kecurangan (<i>Fraud</i>)	18
2.5 Persepsi	19
2.6 Moralitas Individu	20
2.7 Pemerintah Desa	21
2.8 Penelitian Terdahulu	22
2.9 Kerangka Pemikiran	29
2.10 Hipotesis Penelitian	29
BAB 3. METODE PENELITIAN	11
3.1 Jenis Penelitian.....	11
3.2 Populasi dan Sampel.....	11
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	11
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	36
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	37
3.5.1 Variabel Dependen	37
3.5.2 Variabel Independen	37
3.5.3 Variabel Moderating.....	40
3.6 Uji Instrumen	40
3.6.1 Metode Statistik Deskriptif.....	40
3.6.2 Uji Kualitas Data.....	40
3.6.3 Uji Asumsi Klasik	41
3.6.4 Uji Regresi	43
3.6.5 Uji Hipotesis	44
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah.....	46
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian	36
4.1.2 Deskripsi Responden.....	48
4.2 Deskripsi Variabel Penelitian.....	50
4.2.1 Deskripsi Variabel Kesesuaian Kompensasi	50
4.2.2 Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	51
4.2.3 Deskripsi Variabel Komitmen Organisasi	52

4.2.4	Deskripsi Variabel Kompetensi	53
4.2.5	Deskripsi Variabel Moralitas Individu	54
4.2.6	Deskripsi Variabel Kecurangan (<i>Fraud</i>)	55
4.3	Analisis Uji Kualitas Data	56
4.3.1	Hasil Uji Validitas	56
4.3.2	Hasil Uji Reliabilitas	58
4.4	Analisis Uji Asumsi Klasik	59
4.4.1	Hasil Uji Normalitas	59
4.4.2	Hasil Uji Multikolinearitas	60
4.4.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	61
4.5	Analisis Regresi	62
4.5.1	Analisis Regresi Linier Berganda	62
4.5.2	<i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	62
4.6	Uji Hipotesis	63
4.6.1	Uji F	63
4.6.2	Uji t	64
4.6.3	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	66
4.7	Pembahasan Hasil Penelitian	66
4.7.1	Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan (<i>Fraud</i>)	66
4.7.2	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kecurangan (<i>Fraud</i>)	67
4.7.3	Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan (<i>Fraud</i>)	68
4.7.4	Pengaruh Kompetensi terhadap Kecurangan (<i>Fraud</i>)	68
4.7.5	Pengaruh Moralitas Individu dalam Memoderasi Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan (<i>Fraud</i>)	69
4.7.6	Pengaruh Moralitas Individu dalam Memoderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kecurangan (<i>Fraud</i>)	70
4.7.7	Pengaruh Moralitas Individu dalam Memoderasi Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan (<i>Fraud</i>)	70
4.7.8	Pengaruh Moralitas Individu dalam Memoderasi Kompetensi terhadap Kecurangan (<i>Fraud</i>)	71
BAB 5.	PENUTUP	48
5.1	Kesimpulan	48

5.2 Keterbatasan	75
5.3 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

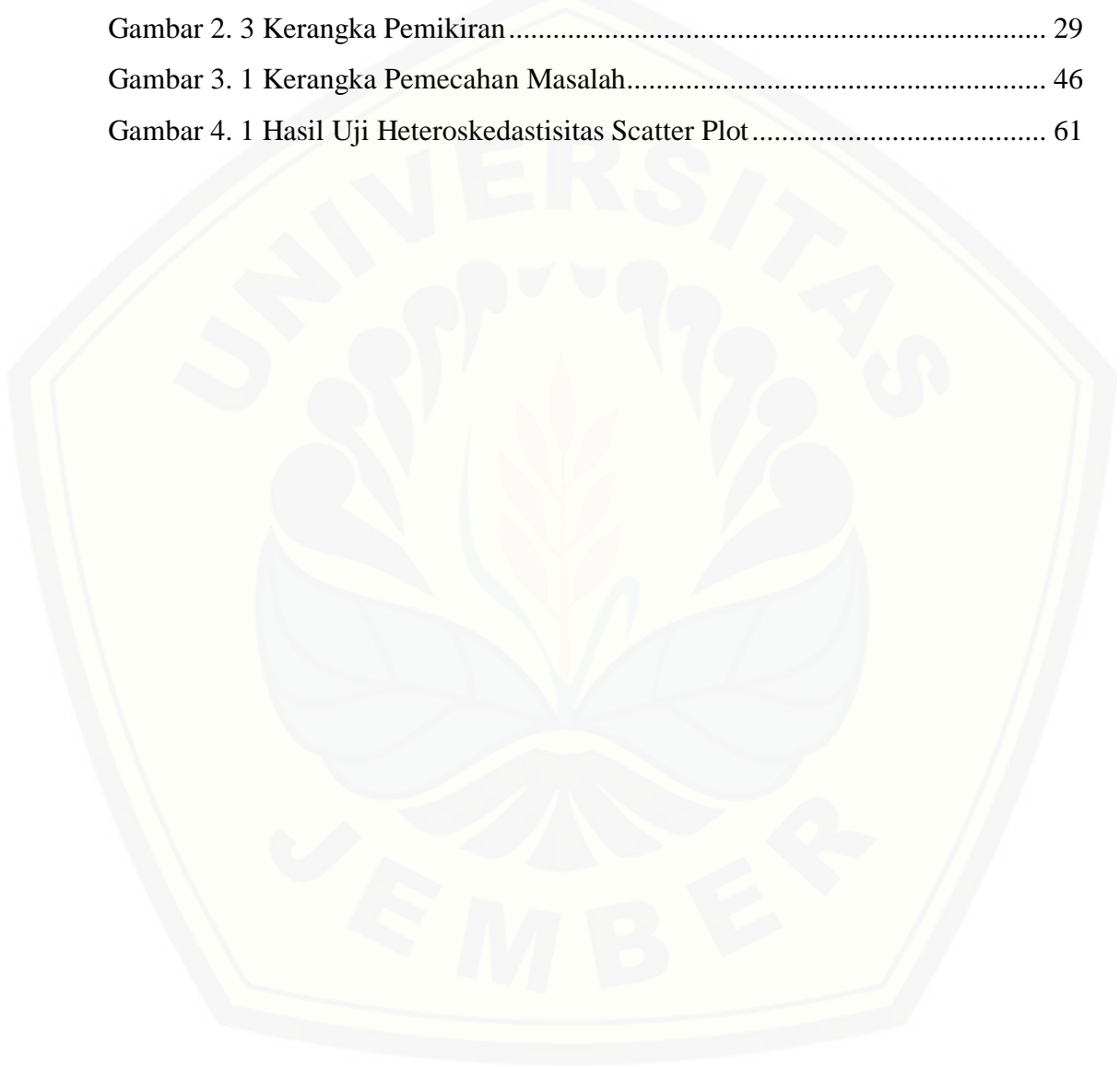


DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3. 1 Pengukuran Skala Likert	36
Tabel 4. 1 Hasil Pengumpulan Data	36
Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden	48
Tabel 4. 3 Jabatan Responden	48
Tabel 4. 4 Masa Kerja Responden	49
Tabel 4. 5 Pendidikan Terakhir Responden	50
Tabel 4. 6 Statistik Deskriptif Variabel Kesesuaian Kompensasi	51
Tabel 4. 7 Statistik Deskriptif Variabel SPIP	52
Tabel 4. 8 Statistik Deskriptif Variabel Komitmen Organisasi	53
Tabel 4. 9 Statistik Deskriptif Variabel Kompetensi	54
Tabel 4. 10 Statistik Deskriptif Variabel Moralitas Individu	55
Tabel 4. 11 Statistik Deskriptif Variabel Kecurangan (<i>Fraud</i>)	56
Tabel 4. 12 Hasil Uji Validitas	57
Tabel 4. 13 Hasil Uji Reliabilitas	59
Tabel 4. 14 Hasil Uji Normalitas	60
Tabel 4. 15 Hasil Uji Multikolinearitas	60
Tabel 4. 16 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	62
Tabel 4. 17 Hasil <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	63
Tabel 4. 18 Hasil Uji F	64
Tabel 4. 19 Hasil Uji t	64
Tabel 4. 20 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	66

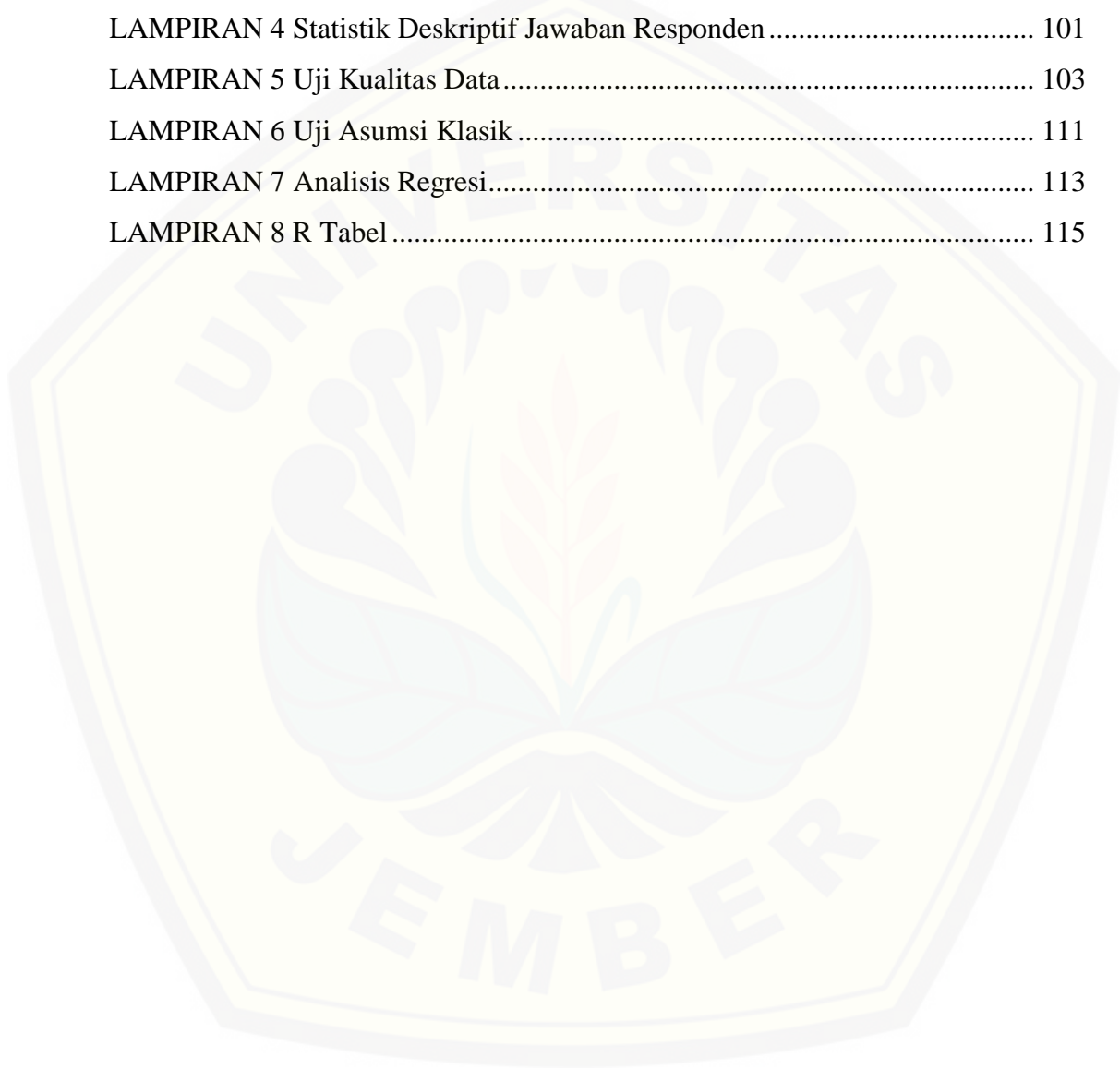
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2015-2018	2
Gambar 2. 1 Teori Berlian Kecurangan (<i>Diamond Fraud</i>)	12
Gambar 2. 2 Susunan Organisasi Pemerintah Desa	22
Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran	29
Gambar 3. 1 Kerangka Pemecahan Masalah.....	46
Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatter Plot.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	77
LAMPIRAN 2 Kuesioner Penelitian	83
LAMPIRAN 3 Rekapitulasi Jawaban Responden	89
LAMPIRAN 4 Statistik Deskriptif Jawaban Responden.....	101
LAMPIRAN 5 Uji Kualitas Data.....	103
LAMPIRAN 6 Uji Asumsi Klasik.....	111
LAMPIRAN 7 Analisis Regresi.....	113
LAMPIRAN 8 R Tabel.....	115

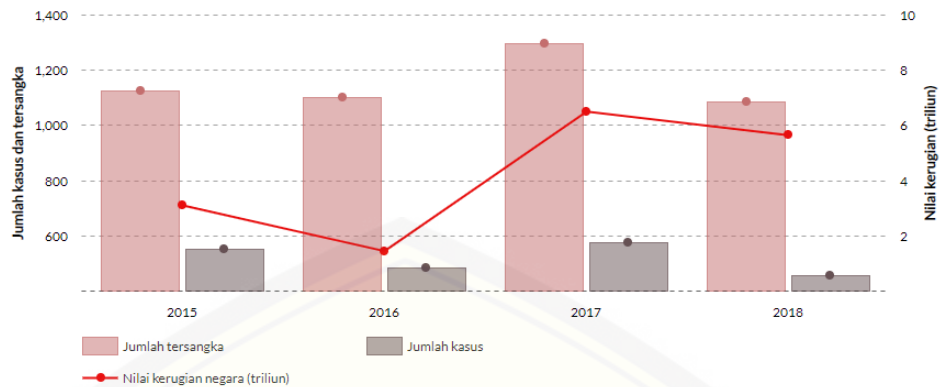


BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik individu maupun berkelompok secara sengaja yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kecurangan juga dikenal dengan istilah *fraud*, yang menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) merupakan perbuatan-perbuatan yang menyalahi hukum yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan tertentu (memanipulasi atau memberikan laporan yang salah terhadap pihak lain) yang dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi ataupun kelompok secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.

ACFE mengklasifikasikan *fraud* dalam tiga jenis yang dikenal dengan istilah “*Fraud Tree*” yaitu penyimpangan atas aset (*asset misappropriation*), pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*) dan korupsi (*corruption*). Berdasarkan survei *fraud* Indonesia tahun 2016 yang dilakukan oleh ACFE yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pencegahan Kejahatan Kerah Putih (P3K2P) STIE Perbanas Surabaya menyatakan bahwa *fraud* yang paling banyak ditemui di Indonesia adalah korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* yang artinya menggoyahkan, rusak, menyogok. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan korupsi merupakan bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Pelaku *fraud* paling banyak berada diusia 36-45 tahun dengan masa kerja lebih dari 10 tahun dan menduduki posisi sebagai *middle management* atau level manajer, ACFE (2016).



Gambar 1. 1 Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2015-2018, Sumber (lokadata.beritagar.id)

Dari data diatas menunjukkan bahwa sepanjang empat tahun terakhir, rata-rata kasus dugaan korupsi yang ditangani sebanyak 392 kasus per tahun. Sementara, rata-rata kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp 4,18 triliun dengan jumlah tersangka korupsi sebanyak 1.153 orang. Jika dihitung berdasarkan rata-rata per bulan, kasus dugaan korupsi yang ditangani oleh penegak hukum cenderung sedikit, dengan rata-rata sebesar 3 orang tersangka yang berhasil di tindak (lokadata.beritagar.id, diakses pada 28 Mei 2019). Skor *Corruption Perceptions Index* (CPI) Indonesia tahun 2018 menurut Transparency International Indonesia (TII) berada diperingkat 89 dengan angka 38. Skor ini mengalami kenaikan dari hasil sebelumnya CPI 2017 yang hanya mendapatkan skor 37. Namun, skor Indonesia masih berada dibawah angka rata-rata CPI Internasional (tirto.id 2019, diakses pada 28 Mei 2019).

Berdasarkan data yang dirilis ICW menunjukkan terdapat 5 sektor dengan kasus korupsi terbanyak sepanjang 2017, dengan peringkat pertama yakni anggaran desa dengan jumlah 98 kasus dan total kerugian negara sebesar Rp 39,3 Miliar, dimana terdapat 30 kepala daerah menjadi tersangka korupsi (ICW, diakses pada 24 April 2019). Sedangkan untuk lembaga yang terkena kasus yakni pemerintah kabupaten 222 kasus, pemerintah desa 106 kasus, pemerintah kota 45 kasus, BUMN 23 kasus, dan kementerian 19 kasus (ICW, diakses pada 24 April 2019). Data tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan di Indonesia sangat memprihatinkan. Hampir sebagian besar kepala daerah terlibat dalam kasus korupsi.

Sejak adanya ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, hingga UU No. 23 Tahun 2014 terkait adanya penyerahan kekuasaan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat yang disebut desentralisasi. Pelimpahan kekuasaan ini memberikan dampak yang positif karena pemerintah pusat sudah menyerahkan kewenangannya agar pemerintah daerah dapat mengembangkan daerahnya sesuai dengan kondisi lingkungan secara mandiri, dengan harapan akan memajukan dan mensejahterakan pembangunan daerah. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena instansi pemerintahan baik pusat dan daerah diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban dalam melaksanakan APBN/D. Laporan keuangan tersebut berguna dalam pengambilan keputusan serta memberikan peluang kepada pengawas keuangan, auditor internal atau eksternal pemerintah untuk menilai dan mengidentifikasi *fraud*.

Pelimpahan kewenangan nyatanya kurang dapat dijalankan dengan baik, hal ini ditunjukkan dari hasil yang ditunjukkan oleh ICW yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah membekuk 29 kepala daerah terkait tangkap tangan (OTT). Sepanjang tahun 2004 sampai tahun 2018 KPK telah membekuk sebanyak 104 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dan pada tahun 2018 tergolong tinggi kepala daerah yang diringkus KPK. Data tersebut juga menunjukkan bahwa ada 14 kasus di wilayah Jawa Timur terkait korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah (jawapos.com 2018, diakses pada 27 April 2019). Kasus korupsi di wilayah Jember, Jawa Timur juga pernah terjadi. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan Sekretaris Daerah daerah Kabupaten Jember, Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) dan Ketua DPRD Jember periode 2014-2019 sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah bantuan sosial tahun 2015. Dampak dari kejadian ini, negara harus menanggung kerugian sebesar Rp 1.045 Miliar (beritasatu.com 2018, diakses pada 3 September 2019).

Pemerintah desa dalam pelaksanaannya wajib memberikan informasi secara transparan dan akuntabel terkait pengelolaan keuangan desa. Karena pemerintah merupakan pengemban kepercayaan masyarakat dimana dalam melaksanakan harus dijalankan dengan baik. Namun, kenyataannya pelaksanaan ini tidak berjalan sesuai harapan. Kepercayaan ini justru disalahgunakan oleh pegawai pemerintahan dengan melakukan tindakan penyimpangan *fraud*. Hal tersebut dapat terjadi karena pegawai memiliki kesempatan atau peluang untuk melakukan *fraud* baik korupsi, penyalahgunaan aset dan kecurangan laporan keuangan.

Data yang diperoleh dari ICW menyatakan bahwa kasus korupsi terkait dengan anggaran desa sebesar 252 kasus sejak tahun 2015 hingga 2018. Hal tersebut, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 107,7 miliar (jawapos.com 2019 (diakses 27 November 2019)). Pemerintah Desa Kabupaten Jember juga terlibat dalam beberapa kasus, diantaranya: 1) Mantan Kades Balung Kidul dipolisikan karena adanya indikasi penyelewangan TKD hingga penyertaan modal BUMDesa dalam SPJ yang sebenarnya tidak ada pengurusnya (radarjember.id 2019 diakses pada 19 September 2019). 2) Adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh mantan Kades Curahlele, Kecamatan Balung, Jember berupa tanah kas desa (sorottransx.com 2019 diakses pada 19 September 2019). 3) Dugaan perangkat desa telah melakukan korupsi berupa pelaksanaan program pembangunan sarana infrastruktur ADD tahun 2016 senilai 1 Miliar di Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi (rri.co.id 2016 diakses pada 24 April 2019), 4) Kepala Desa Wringintelu Kecamatan Puger, menjadi tersangka kasus korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana alokasi desa dan tunjangan kinerja daerah tahun anggaran 2013-2015, dan kerugian negara yang ditanggung dalam kasus ini sebesar Rp 511.259.120 (nasional.kompas.com 2018 diakses pada 22 September 2019).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan, salah satunya berdasarkan teori *fraud diamond* yang dikembangkan oleh Wolfe dan Hermanson (2004). Dalam teori ini, menyebutkan bahwa terdapat empat elemen penyebab seseorang melakukan kecurangan yakni tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*) dan kemampuan (*capability*). Teori

ini merupakan teori pengembangan dari teori *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Cressey (1953). Keempat unsur ini tidak harus dalam proporsi yang sama dalam suatu tindakan kecurangan (Oktavia, 2018). Penelitian ini menggunakan teori *fraud diamond* sebagai dasar teori utama.

Tekanan (*pressure*) dapat membuat pegawai cenderung melakukan kecurangan. Faktor tekanan keuangan atau non keuangan seperti, tekanan pekerjaan, pimpinan, gaya hidup dan lain sebagainya dapat menjadi pendorong seseorang melakukan kecurangan. Rae dan Subraiman (2008) mengatakan tekanan berkaitan dengan motivasi pegawai untuk melakukan penipuan sebagai akibat dari keserakahan atau tentang tekanan keuangan pribadi. Wexley dan Yuki (2003:150) berpendapat adanya ketidakpuasan atas kompensasinya yang tidak sesuai atau pekerjaan yang menjenuhkan juga dapat mendukung kejadian pencurian oleh para pekerja. Kesesuaian kompensasi yang diberikan diharapkan mampu membuat pegawai merasa tercukupi sehingga akan meningkatkan kinerjanya, apabila pegawai merasa kompensasi berupa uang yang diterima tidak sesuai maka akan mendorong seseorang melakukan kecurangan (*fraud*).

Kesempatan (*opportunity*) adalah peluang seseorang untuk melakukan kecurangan. Hal ini, dapat terjadi karena pengawasan atau pengendalian internal yang lemah, dan penyalahgunaan wewenang. Sejalan dengan Adi *et al.* (2016) menyatakan pegawai akan memanfaatkan ketidakefektifan pengendalian internal sebagai suatu titik lemah perusahaan untuk melakukan penyimpangan kecurangan (*fraud*) akibat ketidakefektifan pengendalian internal. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian internal merupakan bagian penting untuk mencapai tujuan organisasi. Wilopo (2008) pengendalian internal birokrasi pemerintah akan memberikan pengaruh terjadinya kecurangan akuntansi pemerintah. Pengendalian internal birokrasi pemerintah yang baik, akan menunjukkan tingkat kecurangan akuntansi yang rendah di sektor pemerintahan.

Rasionalisasi (*rationalization*) menurut Spillane (2003) dalam Yudistira *et al.* (2017) adalah gaya hidup masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip yang menyatukan, dan secara tidak langsung rasionalisasi menyediakan cara untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan situasi yang ada.

Pelaku *fraud* akan merasionalkan bahwa tindakan yang dilakukannya adalah benar. Adanya komitmen organisasi menjadi dasar kepercayaan pegawai atas nilai-nilai organisasi, loyalitas untuk tetap menjadi anggota dan kerelaan membantu mewujudkan tujuan organisasi. Komitmen organisasi akan menciptakan rasa ikut memiliki terhadap organisasi. Yuskar dan Devisia (2011) mengatakan jika pekerja memiliki keterikatan dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dalam bekerja akan timbul rasa senang dalam bekerja, dan kinerjanya dapat meningkat.

Kemampuan (*capability*) melakukan kecurangan dapat muncul jika pelaku jeli dalam melihat peluang yang ada serta memiliki strategi dalam melakukan tindak kejahatannya. Kemampuan dan kekuasaan untuk menentukan dan melakukan sesuatu di organisasinya disebut kompetensi (Anisykurlillah, 2018). Pegawai dengan kompetensi yang tinggi mampu memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Selain itu, kompetensi juga dapat mengenali kelemahan pengendalian internal untuk melakukan kecurangan (*fraud*).

Penelitian kecurangan pada sektor pemerintahan telah banyak dilakukan, diantaranya Faisal (2013) menggali persepsi 118 pegawai di instansi pemerintahan Kabupaten Kudus mengenai kecenderungan terjadinya *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan, sistem pengendalian intern, penegakan hukum, dan komitmen organisasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Tidak terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi dan kultur budaya dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Afsari (2016) telah menganalisis persepsi pegawai pemerintahan yakni SKPD di Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi dan komitmen organisasi terdapat pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, budaya etis manajemen tidak terdapat pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Atmadja dan Saputra (2017) telah melakukan penelitian untuk menguji pengaruh variabel kompetensi dan sistem pengendalian internal di 57 desa Kabupaten Buleleng. Hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa, dan moralitas terbukti dapat menjadi pemoderasi pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal dalam pencegahan *fraud*.

Pada penelitian ini menambahkan moralitas individu sebagai variabel moderating. Penelitian Aranta (2013) menunjukkan bahwa moralitas berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Liyanarachchi dan Newdick (2009) menyatakan tingkat penalaran moral yang tinggi akan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang benar. Selain itu moralitas individu sebagai variabel moderating digunakan dalam penelitian ini karena moralitas individu memiliki pengaruh terhadap kinerja seseorang.

Berdasarkan dari uraian tersebut serta adanya gap penelitian maka peneliti ingin melakukan penelitian terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*) di beberapa desa yang terletak pada 3 kecamatan Kabupaten Jember yakni Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Balung dan Kecamatan Puger mengingat masih adanya kasus kecurangan yang pernah terjadi sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian antara lain:

1. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecurangan?
2. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kecurangan?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecurangan?
4. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kecurangan?
5. Apakah moralitas individu memengaruhi hubungan kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan?
6. Apakah moralitas individu memengaruhi hubungan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kecurangan?

7. Apakah moralitas individu memengaruhi hubungan komitmen organisasi terhadap kecurangan?
8. Apakah moralitas individu memengaruhi hubungan kompetensi terhadap kecurangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kecurangan.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap kecurangan.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi terhadap kecurangan.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh moralitas individu dalam memoderasi kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan.
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh moralitas individu dalam memoderasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kecurangan.
7. Untuk menguji secara empiris pengaruh moralitas individu dalam memoderasi komitmen organisasi terhadap kecurangan.
8. Untuk menguji secara empiris pengaruh moralitas individu dalam memoderasi kompetensi terhadap kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

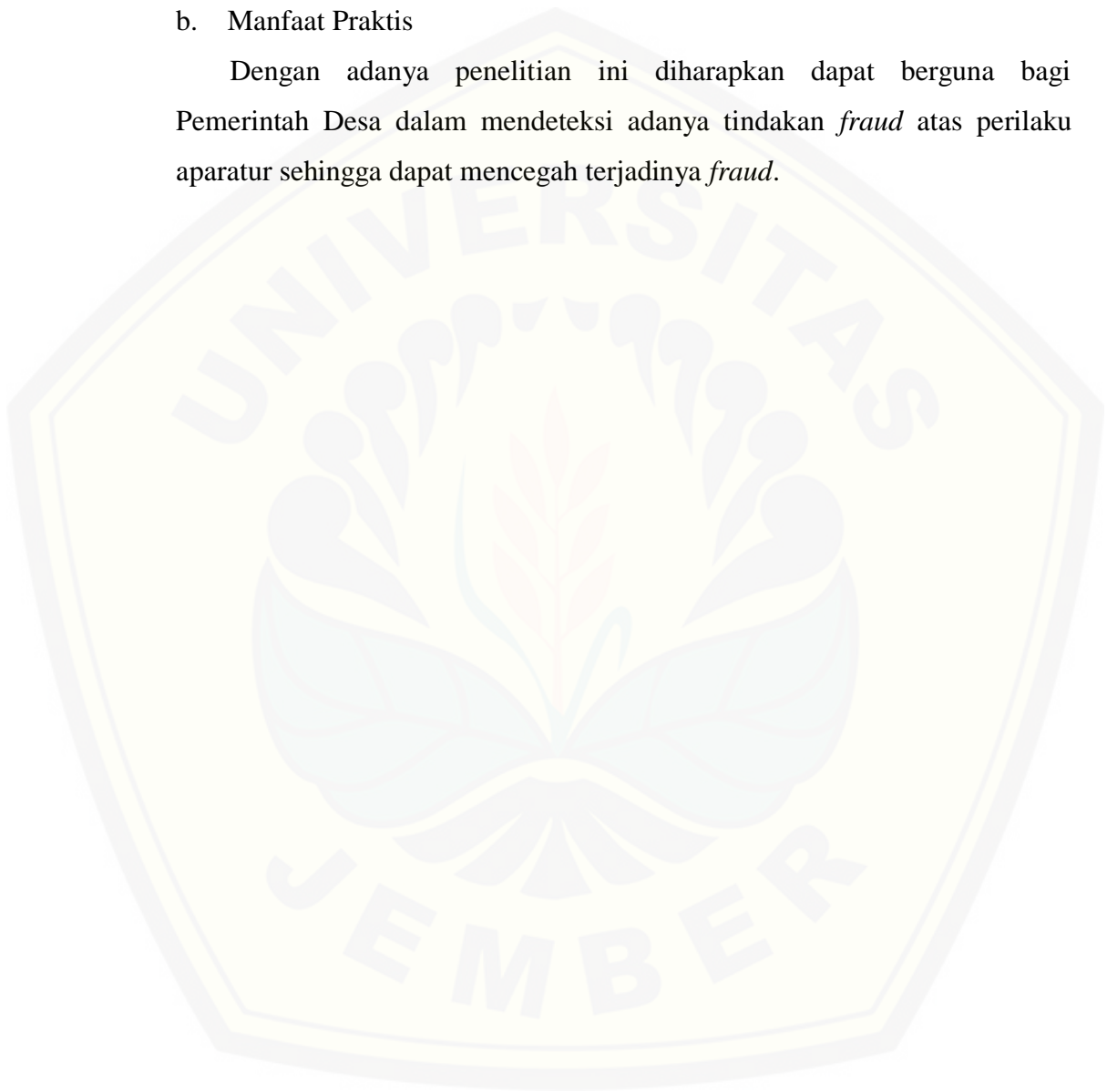
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan kontribusi terkait ilmu yang telah di dapat dalam perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan suatu masalah.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Desa dalam mendeteksi adanya tindakan *fraud* atas perilaku aparatur sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud*.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi diperkenalkan oleh Heider (1958) mengenai kausalitas. Teori atribusi melihat perilaku individu yang tampak untuk menyimpulkan motif, maksud dan karakteristik orang lain, dengan kata lain proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa yang terjadi alasan ataupun sebab perilakunya. Heider (1958) menyatakan perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi internal bersifat personal seperti kemampuan, usaha, dan kelelahan dan kombinasi eksternal bersifat lingkungan seperti aturan dan cuaca, dimana keduanya menentukan perilaku manusia.

Menurut Robbins dan Judge (2017:106) teori atribusi adalah teori yang menjelaskan cara-cara kita menilai orang dengan berbeda yang bergantung pada pengertian yang diatribusikan pada sebuah perilaku, dengan kata lain mengamati individu dan mencoba menentukan apakah disebabkan dari internal artinya berada dalam kendali perilaku individu dan eksternal kondisi yang dibayangkan yakni situasi memaksa individu untuk melakukannya. Penentuan tersebut tergantung tiga faktor yakni 1) perbedaan; 2) konsensus; dan 3) konsistensi.

2.2 Teori *Good Corporate Governance*

Corporate governance (CG) merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992. CG merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pengurus perusahaan, pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal maupun eksternal yang berkaitan dengan kewajiban dan hak-hak mereka, dengan kata lain sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Secara konseptual pengertian tata kelola pemerintahan (*good corporate governance*) yang baik jika ditinjau dari perspektif sektor publik mengandung dua pemahaman yakni nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial (Sari, 2012).

Terdapat lima prinsip dasar dari GCG dalam Kaihatu (2006) antara lain:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan serta kesesuaian terkait dengan perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban seluruh perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara efektif. Perusahaan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian dalam mengelola perusahaan terhadap prinsip badan hukum yang sehat serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu kondisi sebuah perusahaan dikelola secara professional tanpa ada perbedaan kepentingan dan pengaruh ataupun desakan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta adanya prinsip-prinsip badan hukum yang sehat
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu tindakan secara adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang muncul sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku.

Good corporate governance yang baik dalam pemerintahan menghendaki pemerintah mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik seperti keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian serta kesetaraan dan kemandirian sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat dan negara.

2.3 Teori Fraud Diamond

Fraud Diamond merupakan penyempurnaan teori yang telah ada sebelumnya yakni teori segitiga kecurangan (*fraud triangle*) milik Dr. Donald Cressey. Tulisan Cressey termuat dalam *journal of accountancy* dan dalam bukunya *other people's money, a study in the social psychology of embezzlement*, mengatakan bahwa terdapat 3 faktor (tekanan, kesempatan, dan pembenaran) harus ada dalam suatu tindakan kecurangan, artinya salah satu faktor saja tidak

cukup untuk mendorong terjadinya kecurangan (Kuntadi, 2017:34). Teori *fraud diamond* merupakan teori terbaru yang membahas lebih mendalam mengenai faktor-faktor pemicu terjadinya kecurangan. Teori ini dikemukakan oleh Wolfe dan Hermanson (2004), dimana dalam teori menambahkan satu elemen yang dapat dijadikan indikator dalam kecurangan yaitu kemampuan (*capability*).



**Gambar 2. 1 Teori Berlian Kecurangan (Diamond Fraud),
Sumber (The CPA Journal by Wolfe dan Hermanson: 2004)**

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa teori berlian kecurangan (*diamond fraud*) memiliki empat elemen penyebab terjadi kecurangan yaitu insentif atau tekanan (*incentive* atau *pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*razionalitation*), dan kemampuan (*capability*), dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1 Tekanan (*Pressure*)

Tekanan adalah desakan yang dapat membuat seseorang melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Tekanan muncul dari kehidupan individu maupun di lingkungan organisasi, dengan kata lain dari faktor keuangan dan non keuangan. Dorongan akibat gaya hidup dan tuntutan ekonomi seperti memiliki barang-barang yang bersifat ekonomi adalah contoh dari tekanan keuangan. Sedangkan, tindakan menutupi kinerja yang buruk karena tuntutan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang baik adalah contoh dari tekanan non keuangan. Menurut Kuntadi (2016:32) manajemen atau karyawan yang merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan, hal tersebut dapat terjadi karena adanya

kebutuhan dari pelaku. Oleh karena itu, dalam memproyeksikan tekanan dapat tercermin dari kesesuaian kompensasi.

2.3.1.1 Kesesuaian Kompensasi

Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau bukan uang (natura) yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi (KBBI). Menurut Zainal et al. (2015:541) kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi atas jasa mereka pada perusahaan. Berdasarkan uraian diatas kompensasi dapat diartikan sebagai imbalan kepada karyawan sebagai ganti atas jasa mereka setelah melakukan pekerjaan. Menurut Zainal et al. (2015:544) terdapat komponen dari kompensasi yakni gaji, upah, insentif, dan kompensasi tidak langsung.

Gaji merupakan bentuk balas jasa berupa uang yang diterima karyawan sebagai kedudukannya menjadi karyawan atas sumbangan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan perusahaan dan merupakan bayaran yang tetap. Upah merupakan imbalan finansial secara langsung yang dibayarkan berdasarkan jam kerja, jumlah barang atau banyaknya pelayanan yang diberikan kepada karyawan dan besarnya upah dapat berubah-ubah. Insentif adalah imbalan langsung yang dibayarkan karena kinerja yang dilakukan karyawan melebihi standar yang dilakukan. Kompensasi tidak langsung adalah kompensasi tambahan yang diberikan yang didasarkan atas kebijakan setiap perusahaan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Dalam menentukan besaran kompensasi bagi karyawan perusahaan perlu adanya penyesuaian atas kinerja dan kompensasi yang diberikan. Dengan kata lain perlu adanya simbiosis mutualisme dimana antara perusahaan dan karyawan sama-sama diuntungkan. Kompensasi yang diberikan oleh organisasi memiliki nilai yang lebih rendah dari upah yang berlaku dalam masyarakat untuk suatu tipe pekerjaan, maka para pekerja mungkin sekali tidak akan puas dengan kompensasi dan gajinya (Wexley dan Yuki, 2003:150). Ketidak sesuai kompensasi atas tugas yang telah dikerjakan juga dapat memicu seseorang tidak puas atas kompensasinya, sehingga melakukan berbagai cara untuk memperoleh kepuasan salah satunya dengan melakukan tindakan kecurangan.

2.3.2 Peluang (*Opportunity*)

Peluang dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan sehingga membuka peluang tindakan kecurangan (*fraud*). Selain itu, peluang dapat timbul akibat aturan dan sistem pengendalian dalam suatu organisasi kurang berjalan dengan efektif. Sejalan dengan Kuntadi (2016:31) keadaan atau situasi yang membuka peluang bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan, hal tersebut dapat terjadi karena lemahnya sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, dalam memproyeksikan peluang dapat tercermin dari sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

2.3.2.1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pengendalian internal pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Secara teknis penerapan SPIP diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengendalian intern ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Unsur yang terdapat dalam SPIP menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 antara lain:

- a) Lingkungan pengendalian;
- b) Penilaian risiko;
- c) Kegiatan pengendalian;
- d) Informasi dan komunikasi; dan
- e) Pemantauan pengendalian intern.

Keefektifan pengendalian intern dalam sebuah organisasi memiliki peranan penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan

organisasi. Apabila organisasi memiliki keefektifan pengendalian intern yang lemah akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan perbuatan menyimpang atau timbul kecurangan.

2.3.3 Rasionalisasi (*Razionalitation*)

Kuntadi (2016:32) mendefinisikan rasionalisasi adalah sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang memperbolehkan karyawan untuk melakukan tindakan yang tidak jujur atau karyawan berada dalam lingkungan yang cukup menekan sehingga membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi seseorang mencari pembenaran atas tindakannya untuk melakukan kecurangan a) mencontoh tindakan atasan atau rekan kerja; b) merasa telah melakukan perbuatan lebih kepada organisasi; c) menganggap bahwa yang telah diambil tidak seberapa; dan d) adanya anggapan bahwa hal yang diambil sebatas untuk dipinjam dan akan dikembalikan (Afsari, 2016). Oleh karena itu, dalam memproyeksikan rasionalisasi dapat tercermin dari komitmen organisasi.

2.3.3.1 Komitmen Organisasi

Komitmen menurut KBBI merupakan perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Komitmen organisasi adalah suatu pembenaran atas sikap dari rasa loyalitas pegawai terhadap perusahaan (Afsari, 2016). Sedangkan Mustikasari (2013) mendefinisikan komitmen organisasi merupakan persepsi pegawai tentang rasa kepercayaan, keterlibatan, dan loyalitasnya terhadap organisasi yang bersangkutan.

Robbins dan Judge (2008:100) Komitmen organisasional adalah suatu tingkatan sejauh mana karyawan memihak organisasinya serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Komitmen organisasional dapat dibagi menjadi a) komitmen afektif merupakan perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya; b) komitmen berkelanjutan merupakan nilai ekonomi yang dirasakan oleh karyawan dari bertahan dengan organisasinya dan dibandingkan apabila meninggalkan organisasinya; dan c) komitmen normatif merupakan komitmen untuk bertahan dengan organisasi untuk alasan moral atau etis.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah sikap seorang karyawan yang menggambarkan loyalitasnya kepada organisasi dan sejauh mana keinginan karyawan agar bertahan di perusahaan serta mengharapkan tercapainya tujuan-tujuan organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi mampu menurunkan tingkat kecurangan (*fraud*) karena memiliki loyalitas tinggi serta keinginan untuk mencapai tujuan organisasi.

2.3.4 Kemampuan (*Capability*)

Wolfe dan Hermanson (2004) menjelaskan beberapa sifat-sifat terkait elemen kemampuan dalam pribadi pelaku *fraud*, antara lain:

- *Position*: posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi mampu memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penipuan. Seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar atas situasi tertentu atau lingkungan.
- *Intelligence*: pelaku *fraud* memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar.
- *Convindence/Ego*: seseorang harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar bahwa dia tidak akan terdeteksi. Tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri (*narsisme*).
- *Coercion Skill*: pelaku *fraud* dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seseorang individu yang memiliki kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk pergi bersama dengan penipuan atau melihat ke arah lain.
- *Effective Lying*: penipuan yang berhasil membutuhkan kebohongan yang efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi maka individu harus mampu berbohong meyakinkan dan harus melacak cerita secara keseluruhan
- *Immunity to Stress*: pelaku harus mampu mengendalikan stress karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stress.

Oleh karena itu, dalam memproyeksikan kemampuan dapat tercermin dari kompetensi (Oktavia, 2018).

2.3.4.1 Kompetensi

Kompetensi merupakan kata dasar dari kompeten yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Menurut Zainal et al. (2015:232) kompetensi adalah karakteristik dari dasar individu yang berhubungan dengan kinerja yang efektif atau kompetensi terbaik (superior) yang beragam dan berbeda dengan kinerja individu lainnya yang tingkat kompetensinya tergolong rata-rata. Zainal et al. (2015:232) kompetensi dapat berupa motif, sifat, konsep diri, sikap, atau nilai atau keterampilan kognitif atau perilaku karakteristik individual apa saja yang dapat diukur atau dihitung dan yang dapat diperlihatkan untuk membedakan secara signifikan antara para kinerja terbaik dengan kinerja rata-rata.

Motif merupakan kebutuhan dasar atau pola pikir yang menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku individu, misalnya kebutuhan untuk berprestasi. Sifat merupakan bawaan umum untuk berperilaku ataupun merespons dengan cara tertentu, misalnya dengan kepercayaan diri, kontrol diri, dan kekerasan. Konsep diri merupakan sikap atau nilai yang diukur dari hasil tes responden misalnya pertanyaan terkait apa yang dinilai, apa yang dilakukan dan alasan ketertarikan atas pekerjaan mereka. *Content knowledge* merupakan hal yang berhubungan dengan fakta atau prosedur secara teknis atau interpersonal. Keterampilan kognitif dan behavioral (perilaku) merupakan hal terselubung misalnya berpikir deduktif atau induktif atau dapat diamati misalnya keterampilan mendengarkan secara aktif.

McClelland (1973) mendefinisikan kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang dan memiliki pengaruh langsung atau mampu memprediksikan, kinerja yang sangat baik. Secara rinci kompetensi dapat di klasifikasikan antara lain a) keterampilan yakni keahlian atau kecakapan dalam melakukan sesuatu dengan baik; b) pengetahuan yakni informasi yang dimiliki atau dikuasai individu dalam bidang tertentu; c) peran sosial yakni citra yang dapat digambarkan individu kepada orang lain; d) citra diri yakni persepsi individu tentang dirinya sendiri; e) trait yakni karakteristik yang relatif konstan

pada tingkah laku individu; dan f) motif yakni pemikiran atau niat dasar yang mampu mendorong individu untuk melakukan tindakan ataupun perilaku. Kompetensi atas keterampilan dan pengetahuan merupakan yang paling mudah untuk dikenali dan relatif mudah dibentuk ataupun dikembangkan misalnya dengan pelatihan dan proses belajar. Sedangkan peran sosial, citra diri, trait, dan motif sulit untuk dikenali dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dikembangkan dan diperbaiki.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan kompetensi adalah karakteristik individu terkait kinerja terbaiknya yang berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, peran sosial, citra diri, trait, dan motif. Individu yang memiliki kompetensi tinggi akan mendorong dan melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien, serta dapat mengenali kelemahan dari pengendalian intern organisasi untuk melakukan kecurangan.

2.4 Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan (*fraud*) menurut Webster's New World Dictionary adalah terminologi umum yang mencakup beragam makna tentang kecerdikan, akal bulus, tipu daya manusia yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan (di) atas orang lain melalui cara pelaporan yang salah. Menurut standar The Institute of Internal Auditors (IIA) (2016:22) adalah suatu tindakan illegal yang bercirikan penipuan, penyembunyian, dan penyalahgunaan kepercayaan. Salah satu tindakan kecurangan bisa meliputi ancaman atau pelanggaran dalam kekuatan fisik. Hal ini dilakukan untuk memperoleh uang, aset, atau jasa; untuk menghindari pembayaran atau kerugian atas jasa; atau untuk memperoleh keuntungan pribadi atau bisnis.

Definisi kecurangan (*fraud*) menurut Menurut *Black Law Dictionary fraud* adalah kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat memengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikan, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa khusus (khususnya dilakukan secara sengaja, memungkinkan merupakan suatu kejahatan. *Fraud* perlu dibedakan

dengan *error* atau kesalahan. Faktor yang membedakan antara kecurangan dan kekeliruan adalah dengan meninjau tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang disengaja atau tidak disengaja (Tuannakotta, 2015:195)

Kutipan menurut ISA 240 dalam Tuannakotta (2015:194) mendefinisikan *fraud*:

“An intentional act by one or more individuals among management, those charged with governance, employees, or third parties, involving the use of deception to obtain an unjust or illegal advantage.”

Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan, “*fraud* adalah tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen, pengawas, karyawan, atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau illegal.”

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *fraud* merupakan tindakan tidak jujur atau menyimpang yang dilakukan secara sengaja oleh individu maupun kelompok dengan rasa kesengajaan atau niat untuk menghindari pembayaran atau kerugian atas jasa atau untuk memperoleh keuntungan yang dapat merugikan pihak lain.

2.5 Persepsi

Menurut Robbins dan Judge (2017:103) persepsi merupakan sebuah proses individu dalam mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Hasil dari nilai yang diberikan oleh individu bisa saja berbeda secara substansial dengan realitas objektif. Mustikasari (2013) berpendapat persepsi adalah bagaimana cara individu menafsirkan dan melihat suatu objek ataupun kejadian.

Persepsi memiliki sifat subjektif karena persepsi mencakup penilaian seseorang yang berbeda-beda terhadap suatu objek. Namun dengan adanya persepsi seseorang memulai hubungan interaksi dengan orang lain. Persepsi individu terhadap suatu objek terbentuk dengan adanya peran dari *perceiver*, *target*, *situation* dan *experience*.

2.6 Moralitas Individu

Moral dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya. Menurut Aranta (2013) moralitas adalah tekad untuk mengikuti segala hal yang ada dalam hati manusia dan disadari sebagai kewajiban mutlak. Sedangkan bermoral merupakan pertimbangan baik dan buruk, berakhlak baik. Moral dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Moral murni, adalah moral yang terdapat pada setiap manusia. Moral murni disebut juga hati nurani, dan
- 2) Moral terapan, adalah moral yang didapat dari berbagai ajaran filosofis, agama, adat yang menguasai pemutaran manusia.

Moralitas individu memiliki peran terhadap kecurangan (*fraud*). Moral dapat berupa tindakan manusia baik yang bernilai positif (bermoral) maupun negatif (amoral). Moralitas tercermin dari tindakan perilaku baik seseorang yang berasal dari diri sendiri (Wijayanti dan Hanafi, 2018). Kohlberg (1971) memiliki pandangan bahwa penalaran moral merupakan landasan perilaku tidak etis, dimana perkembangan moral merupakan ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Terdapat tiga tahapan perkembangan moral, yaitu tahapan *pre-conventional*, tahapan *conventional*, dan tahapan *post-conventional*.

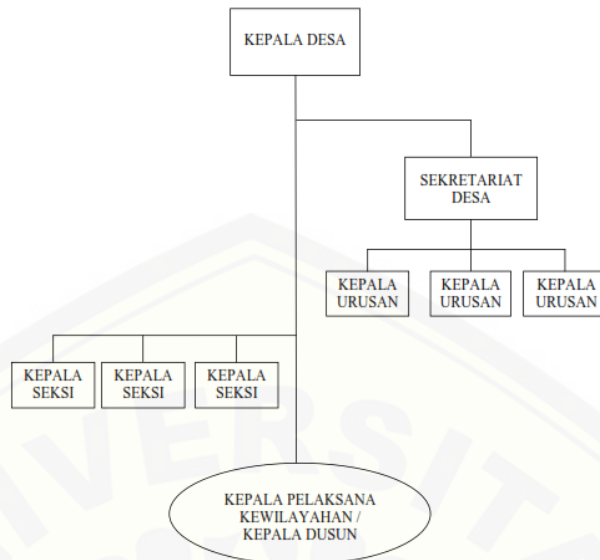
Tahapan pertama *pre-conventional* adalah tahapan yang paling rendah dimana individu akan cenderung bertindak karena takut atau tunduk pada hukum yang ada. Selain itu seseorang pada level ini akan memandang kepentingan pribadinya sebagai hal yang utama dalam melakukan suatu tindakan. Tahapan kedua *conventional* individu memiliki dasar pertimbangan moral berkaitan dengan pemahaman hukum, aturan sosial di masyarakat, kewajiban, dan keadilan dalam lingkungan sosialnya. Pada tahapan ini mulai membentuk moralitas manajemennya dengan menaati peraturan seperti aturan akuntansi untuk menghindari kecurangan. Tahapan ketiga *post-conventional* merupakan tahap tertinggi dimana individu telah menunjukkan kematangan moral manajemen yang lebih tinggi. Berdasarkan

tanggung jawab sosial, manajemen yang memiliki moralitas tinggi diharapkan tidak akan melakukan perilaku yang menyimpang.

2.7 Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Zainudin, 2016). Permendagri No. 20 Tahun 2018 mendefinisikan pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Tujuan diselenggarakannya pemerintah daerah adalah sebagai proses pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk wilayah desa. Selain itu dengan pemerintah desa juga dapat mengembangkan potensi dan kesejahteraan masyarakat.

Permendagri No 20 dalam pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. Perangkat desa yang dimaksudkan terdiri atas sekretaris desa, kaur dan kasi. Sebagaimana dalam permendagri No. 84 Tahun 2015 pasal 3 dimana sekretaris desa dibantu oleh 3 urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Sedangkan dalam pasal 5 pelaksana teknis terdiri atas 3 seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.



**Gambar 2. 2 Susunan Organisasi Pemerintah Desa
Sumber (Permendagri No 84 Tahun 2015)**

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kecurangan (*fraud*) telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Mustikasari (2013) yang meneliti terkait bagaimana persepsi pegawai dinas Kabupaten Batang. Sebanyak 153 pegawai dipilih untuk dijadikan sampel dengan menggunakan *convenience sampling* terkait faktor-faktor yang memengaruhi kecurangan (*fraud*). Hasil penelitiannya dengan menggunakan analisis *full model Structural Equation Modeling (SEM)* dengan analisis *smartPLS* menunjukkan bahwa penegakan hukum/peraturan, keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, budaya etis manajemen dan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan, sedangkan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap *fraud* di sektor pemerintahan dan tidak terdapat pengaruh antara keadilan prosedural dengan *fraud* di sektor pemerintahan.

Penelitian Faisal (2013) menggali persepsi 118 pegawai di instansi pemerintahan Kabupaten Kudus mengenai kecenderungan terjadinya *fraud*. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Analisis data yang digunakan adalah analisis *full model Structural Equation Modeling (SEM)* dengan analisis *smartPLS* menunjukkan hasil pengaruh negatif antara gaya

kepemimpinan, sistem pengendalian intern, penegakan hukum, dan komitmen organisasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Tidak terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi dan kultur budaya dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Penelitian Adinda dan Ikhsan (2015) menguji persepsi pegawai negeri di instansi pemerintahan Kabupaten Klaten sebanyak 150 sampel yang dipilih dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan analisis *full model Structural Equation Modeling (SEM)* dengan analisis *smartPLS* menunjukkan terdapat pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian internal, kultur organisasi, keadilan prosedural dan komitmen organisasi dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Terdapat pengaruh positif antara keadilan distributif dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Tidak terdapat pengaruh antara kesesuaian kompensasi dan penegakan peraturan dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Penelitian Adi et.al, dkk (2016) meneliti terkait persepsi pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan. Sebanyak 35 responden terpilih dengan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian dengan menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa asimetri informasi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Terdapat pengaruh tidak signifikan antara penegakan hukum, efektifitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, keadilan prosedural dan budaya etis organisasi terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Penelitian Afsari (2016) telah menganalisis persepsi pegawai pemerintahan yakni SKPD di Jember. Alat statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda, menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi dan komitmen organisasi terdapat pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, budaya etis manajemen tidak terdapat pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Penelitian Atmadja dan Saputra (2017) telah menguji pengaruh variabel kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dengan moralitas sebagai variabel moderasi. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 57 desa di Kabupaten Buleleng. Hasil analisis data dengan regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa, serta moralitas terbukti sebagai pemoderasi pengaruh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian Anisykurlillah (2018) telah menganalisis terkait moralitas individu sebagai moderasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Sampel penelitian ini sebanyak 112 responden dengan *convenience sampling*. Analisis yang digunakan adalah SmartPLS menunjukkan bahwa keadilan distributive, keadilan prosedural, asimetri informasi, dan kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Sedangkan komitmen organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Moralitas individu hanya mampu memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kecurangan akuntansi.

Penelitian Oktavia (2018) telah meneliti terkait determinan kecurangan berbasis *diamond fraud* dan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening pada pemerintah desa di Kabupaten Lumajang. Sebanyak 116 desa dijadikan sampel dengan teknik pemilihan sample daerah multistage (*multistage area sampling*) dan terpilih 286 responden. Hasil penelitian dengan analisis *Structural Equation Modelling* menunjukkan bahwa kepuasan kompensasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh negatif terhadap kecurangan, budaya organisasi dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kecurangan.

Beda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pemilihan objek di pemerintahan desa yang masih belum banyak dilakukan penelitian terdahulu terutama di wilayah Kabupaten Jember. Hasil dari para penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya ketidak konsistenan menjadi pendukung peneliti ingin

melakukan penelitian kembali, serta adanya menambahkan variabel moderating yakni moralitas individu.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

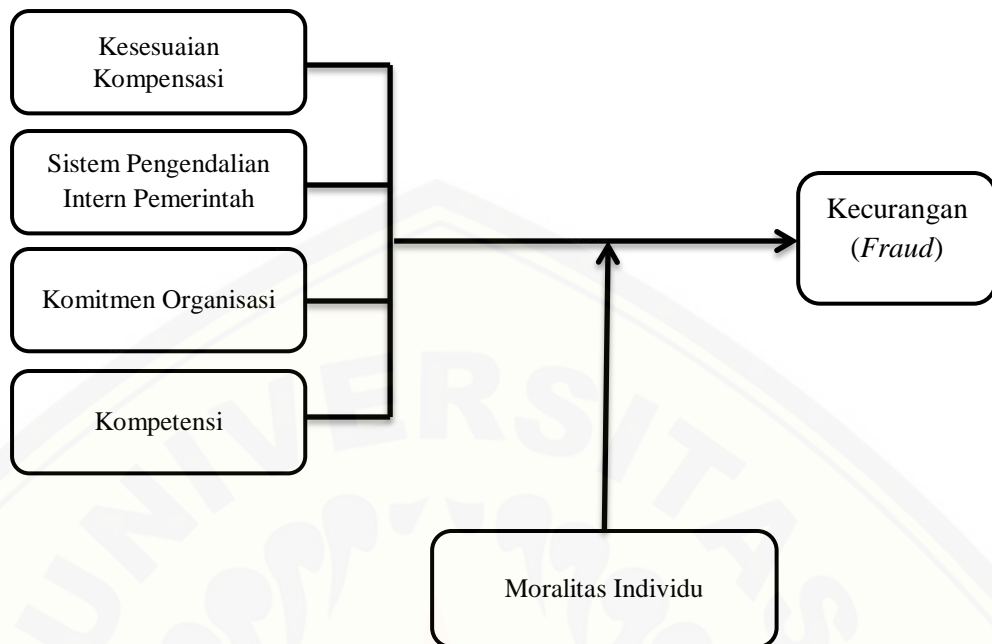
No	Peneliti dan Tahun	Variabel	Model Penelitian	Hasil
1	Mustikasari (2013)	<p>Variabel independen: Penegakan hukum/peraturan, keefektifan pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, keadilan procedural, budaya etis manajemen, dan komitmen organisasi.</p> <p>Variabel dependen: kecurangan (<i>fraud</i>)</p>	Analisis smart <i>partial least square</i> (LPS)	Penegakan hukum/peraturan, keefektifan pengendalian internal, budaya etis manajemen, komitmen organisasi, dan kesesuaian kompensasi, berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> , asimetri informasi berpengaruh positif terhadap <i>fraud</i> , dan keadilan procedural tidak ada pengaruh dengan <i>fraud</i> .
2	Faisal (2013)	<p>Variabel independen: Sistem pengendalian intern, gaya kepemimpinan, Kesesuaian kompensasi, perilaku tidak etis, kultur organisasi, komitmen organisasi, penegakan hukum.</p> <p>Variabel dependen: <i>fraud</i></p>	Analisis smart <i>partial least square</i> (LPS)	Gaya kepemimpinan, sistem pengendalian intern, penegakan hukum, dan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> , perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap <i>fraud</i> , kesesuaian kompensasi dan kultur organisasi tidak terdapat pengaruh terhadap <i>fraud</i> .

3	Adinda dan Ikhsan (2013)	<p>Variabel independen: Keefektifan pengendalian internal, kultur organisasi, kesesuaian kompensasi, penegakan peraturan, keadilan distributif, keadilan prosedural dan komitmen organisasi</p> <p>Variabel dependen: kecurangan (<i>fraud</i>)</p>	Analisis smart <i>partial least square</i> (LPS)	Keefektifan pengendalian internal, kultur organisasi, keadilan prosedural, dan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap <i>fraud</i> , keadilan distributif berpengaruh positif terhadap <i>fraud</i> , kesesuaian kompensasi dan penegakan peraturan tidak terdapat pengaruh terhadap <i>fraud</i> .
4	Adi et.al, dkk (2013)	<p>Variabel independen: Penegakan hukum, efektifitas pengendalian internal, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, keadilan prosedural, budaya etis manajemen, dan komitmen organisasi.</p> <p>Variabel dependen: kecurangan (<i>fraud</i>)</p>	<i>Multiple Linear Regression</i>	Penegakan hukum, efektifitas pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, keadilan prosedural dan budaya etis organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap <i>fraud</i> , Asimetri informasi dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap <i>fraud</i> .

5	Afsari (2016)	<p>Variabel independen: Kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal pemerintah, penegakan peraturan, budaya etis, dan komitmen organisasi.</p> <p>Variabel dependen: kecurangan (<i>fraud</i>)</p>	<p><i>Multiple Linear Regression</i></p>	<p>Kesesuaian kompensasi dan komitmen organisasi berpengaruh positif dengan kecenderungan kecurangan, gaya kepemimpinan, sistem pengendalian internal pemerintah, penegakan peraturan, budaya etis tidak berpengaruh dengan kecenderungan kecurangan.</p>
6	Atmadja dan Saputra (2017)	<p>Variabel independen: kompetensi aparatur, sistem pengendalian intern</p> <p>Variabel dependen: pencegahan <i>fraud</i></p> <p>Variabel moderasi: moralitas.</p>	<p><i>Multiple Linear Regression dan Moderated Regression Analysis</i></p>	<p>Kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> dan moralitas berhasil memoderasi pengaruh kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan <i>fraud</i></p>

7	Anisykurlillah (2018)	<p>Variabel independen: keadilan distributif, keadilan prosedural, komitmen organisasi, asimetri informasi, kompetensi.</p> <p>Variabel dependen: kecurangan.</p> <p>Variabel moderasi: moralitas individu.</p>	Analisis <i>SmartPLS</i>	Keadilan distributif, keadilan prosedural, asimetri informasi, dan kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan akuntansi. Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Moralitas individu mampu memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kecurangan akuntansi
8	Oktavia (2018)	<p>Variabel independen: kepuasan kompensasi, sistem pengendalian intern pemerintah, budaya organisasi, kompetensi.</p> <p>Variabel dependen: kecurangan.</p> <p>Variabel intervening: perilaku tidak etis.</p>	<i>Structural Equation Modeling</i>	Kepuasan kompensasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh negatif terhadap kecurangan, budaya organisasi dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kecurangan.

2.9 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 3 Kerangka Pemikiran

2.10 Hipotesis Penelitian

2.10.1 Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Elemen pertama dari teori *fraud diamond* adalah tekanan (*pressure*). Tekanan adalah dorongan atau motivasi dalam diri seseorang untuk melakukan kecurangan. Kompensasi merupakan hal penting bagi pegawai yang bekerja di suatu organisasi. Bagi pegawai kompensasi merupakan suatu *outcome* atau *reward* karena pemberian kompensasi dapat memenuhi kebutuhannya (Adinda dan Ikhsan 2015). Pemberian kompensasi pada pemerintah desa telah diatur oleh peraturan yang telah ditetapkan. Kompensasi yang diberikan diharapkan membuat pegawai merasa tercukupi sehingga meningkatkan kinerjanya serta dapat mengurangi tindakan kecurangan.

Penelitian Afsari (2016) menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif terhadap kecurangan, sedangkan penelitian Mustikasari (2013) dan Oktavia (2018) menunjukkan adanya pengaruh negatif antara kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan. Berbeda dengan Wilopo (2006) yang menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh signifikan

terhadap kecenderungan kecurangan. Kesesuaian kompensasi yang diterima oleh karyawan dapat menjadi gambaran dari faktor yang memengaruhi seseorang melakukan kecurangan. Apabila sebuah organisasi memberikan kompensasi yang tidak sesuai atau rendah dan dirasa pegawai tidak sesuai, maka pegawai akan mencari tambahan dana lain yang dapat memicu terjadinya tindakan kecurangan. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

H1 : Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*)

2.10.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Elemen kedua dari teori *fraud diamond* adalah peluang (*opportunity*). Peluang dapat muncul akibat lemahnya pengawasan sehingga dapat membuka kesempatan individu untuk melakukan tindakan kecurangan. Sistem pengendalian intern pemerintah yang lemah dapat memicu pegawai untuk melakukan kecurangan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan pengendalian intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan.

Penelitian Mustikasari (2013), dan Adi et.al (2013) menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Sedangkan penelitian Afsari (2016) dan Adinda dan Ikhsan (2013) menunjukkan bahwa SPIP tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. Pengendalian di pemerintah desa perlu diperhatikan agar dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan meminimalisir kecurangan. Semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah maka akan semakin rendah tingkat kecurangan. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

H2 : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*).

2.10.3 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Elemen ketiga dari teori *fraud diamond* adalah rasionalisasi (*razionalization*). Rasionalisasi dalam tindak kecurangan merupakan sikap atau proses berfikir dengan pertimbangan moral dan individu karyawan untuk

membenarkan tindakannya. Komitmen dapat diartikan sebagai keadaan seseorang yang membuat perjanjian baik kepada diri sendiri maupun orang lain dengan dibuktikannya tindakan atau tingkah laku yang dilakukan secara sukarela atau terpaksa. Individu yang memiliki komitmen tinggi akan bersedia untuk memberikan usaha terbaik demi kemajuan organisasi yang sehat (Anisykurlillah, 2018). Perangkat desa di pemerintah desa perlu memastikan bahwa pegawainya memiliki komitmen organisasi yang tinggi, karena komitmen dapat berpengaruh pada produktivitas kerja. Produktivitas yang baik akan mendukung tercapainya tujuan organisasi.

Penelitian Afsari (2016) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinda dan Ikhsan (2013) dan Faisal (2013) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan. Komitmen individu terhadap organisasi dapat dijadikan tolak ukur seseorang dalam melakukan tindakan. Pegawai yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasi maka mampu meminimalisir terjadinya kecurangan. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

H3 : Komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*).

2.10.4 Pengaruh Kompetensi terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Elemen keempat dari teori *fraud diamond* adalah rasionalisasi (*razionalization*). Kompetensi adalah karakteristik yang menggambarkan cara berpikir, bersikap, dan bertindak dari seseorang dan memberi kesimpulan terkait hal yang dilakukan dan dipertahankan pada periode waktu tertentu (Oktavia, 2018). Pemerintahan desa perlu memiliki pegawai yang memiliki kompetensi yang tinggi, karena kompetensi dapat menjadi faktor utama bagi seseorang dalam menghasilkan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. Kompetensi ini dapat menjadi dasar perangkat desa untuk melakukan kinerjanya yang harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oktavia (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kecurangan. Berbeda dengan penelitian

Anisykurlillah (2018) yang menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan. Seseorang yang memiliki kompetensi biasanya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki jabatan atau posisi tinggi pula sehingga memiliki pemahaman yang baik. Hal ini, dapat dijadikan peluang untuk mengetahui kelemahan organisasi dan dapat melakukan tindakan kecurangan. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

H4 : Kompetensi berpengaruh positif terhadap kecurangan (*fraud*).

2.10.5 Pengaruh Moralitas Individu dalam Memoderasi Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Pemberian kompensasi sangat berpengaruh bagi pegawai dalam suatu organisasi. Kompensasi merupakan pendapatan sekaligus jaminan untuk keberlangsungan hidup pegawai. Pemerintah desa dalam menjalankan kegiatannya telah diatur oleh peraturan, begitu pula dengan kompensasi yang akan diberikan. Kompensasi yang diberikan diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah dilakukan. Apabila, pegawai tidak puas terhadap kompensasinya dapat membuka peluang untuk melakukan tindakan kecurangan. Setiap individu perlu memiliki moralitas yang baik. Seseorang yang memiliki moralitas tinggi akan bertindak baik dan sesuai dengan aturan.

Pemberian kompensasi yang sesuai diharapkan pegawai mampu bekerja sesuai dengan tanggungjawabnya dan demi terwujudnya tujuan organisasi. Moralitas yang tinggi akan tahu tanggungjawabnya dan berusaha untuk menghindari dari tindakan kecurangan. Pegawai pemerintahan yang mempersepsikan bahwa kesesuaian kompensasi tinggi dan memiliki level penalaran moral tinggi akan mengerti kompensasi yang diberikan telah sesuai dengan kontribusi atas jasa mereka, sehingga tidak muncul peluang terjadinya tindakan kecurangan.

H5 : Moralitas individu memperkuat pengaruh negatif kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan.

2.10.6 Pengaruh Moralitas Individu dalam Memoderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Teori atribusi merupakan penentuan apakah perilaku seorang individu disebabkan dari internal atau eksternal (Robbins dan Judge, 2017). Perilaku eksternal dapat muncul akibat adanya aturan dan sanksi yang berlaku. Moralitas individu memiliki peranan karena moralitas yang tinggi dapat memahami hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam menjalankan kegiatannya, pemerintah desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 terkait SPIP. SPIP bertujuan agar tercapainya pengelolaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Hasil penelitian Atmadja dan Saputra (2017) menyimpulkan dalam penelitiannya moralitas dapat memoderasi sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Sistem pengendalian internal pemerintah yang lemah akan memberikan peluang seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Namun, apabila seseorang memiliki level penalaran moral yang tinggi akan dapat memperbaiki pengendalian internal sehingga tidak muncul terjadinya peluang tindakan kecurangan akuntansi. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

H₆ : Moralitas individu memperkuat pengaruh negatif sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kecurangan.

2.10.7 Pengaruh Moralitas Individu dalam Memoderasi Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan terkait perilaku seseorang (Heider, 1958). Perilaku baik buruknya seseorang dapat dipengaruhi oleh moralitas individunya. Seseorang yang memiliki moralitas baik akan bertanggungjawab atas segala tindakannya. Dengan kata lain, seseorang tersebut akan berkomitmen terhadap apa yang menjadi tugasnya. Setiap perangkat desa memiliki komitmen terhadap instansinya, hal ini di tandai dengan keinginan untuk menjadikan instansi mereka menjadi instansi yang baik dan mencapai tujuan organisasi.

Hasil penelitian Anisykurlillah (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa moralitas individu tidak dapat memoderasi antara komitmen organisasi terhadap kecurangan. Menjalankan pemerintahan desa perlu adanya komitmen dan moralitas yang tinggi. Komitmen yang sejalan dengan moralitas individu memberikan pengaruh yang baik bagi keberlangsungan pemerintahan. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

H7 : Moralitas individu memperkuat pengaruh negatif komitmen organisasi terhadap kecurangan.

2.10.8 Pengaruh Moralitas Individu dalam Memoderasi Kompetensi terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Kompetensi merupakan kemampuan seseorang yang dapat ditinjau dari pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kompetensi perangkat desa yang memadai serta adanya peran aktif masyarakat desa perlu diperhatikan dalam pengelolaannya, karena hal tersebut rentan terjadi tindakan kecurangan.

Hasil penelitian Anisykurlillah (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa moralitas individu tidak dapat memoderasi antara kompetensi terhadap kecurangan. Berbeda dengan dengan Atmadja dan Saputra (2017) moralitas dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kecurangan. Seseorang yang memiliki kompetensi tinggi akan memiliki pemahaman yang baik, sehingga dapat mengetahui peluang untuk melakukan tindakan kecurangan. Namun, apabila disertai dengan moralitas yang tinggi pula, maka dapat meminimalisir seseorang akan melakukan kecurangan. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

H8 : Moralitas individu memperlemah pengaruh positif kompetensi terhadap kecurangan.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indrianto dan Supomo, 2014:12). Penelitian ini akan menguji persepsi perangkat desa desa tentang faktor penyebab terjadinya *fraud* berdasarkan teori *fraud Diamond*. Variabel yang digunakan yakni kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian intern pemerintah, komitmen organisasi dan kompetensi. Selain itu, untuk mengetahui pengaruh moralitas individu sebagai variabel moderating.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu (Indrianto dan Supomo, 2014:115). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa di Wilayah Pemerintah Desa Kecamatan Sukorambi, Balung dan Puger di Kabupaten Jember. Sampel merupakan bagian elemen-elemen dari populasi (Indrianto dan Supomo, 2014:115). Sampel penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala tata usaha, kepala seksi pelayanan umum, kepala seksi kesejahteraan rakyat dan kepala seksi pemerintahan dari 3 kecamatan yakni Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Balung dan Kecamatan Puger. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria dari pegawai pemerintahan yang telah bekerja lebih dari satu tahun, tujuannya karena memiliki kewenangan serta memiliki pemahaman yang lebih terkait kondisi desa.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subyek. Data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang ataupun sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian atau responden (Indrianto dan Supomo, 2014:145).

Jika ditinjau berdasarkan sumber data, penelitian ini tergolong ke dalam data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara (Indrianto dan Supomo, 2014:146). Data ini berupa sikap, opini, pengalaman atau karakteristik yang diperoleh secara langsung dari responden yakni setiap perangkat desa di Pemerintah Desa di Wilayah Kecamatan Sukorambi, Balung, dan Puger.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah metode survei melalui penyebaran kuesioner. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis (Indrianto dan Supomo, 2014:152). Kuesioner dalam penelitian ini disusun menggunakan skala Likert. Skala Likert (*Likert Scale*) adalah metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ke-tidaksetujuan-nya terhadap subyek, obyek, atau kejadian tertentu (Indrianto dan Supomo, 2014:152). Skala ini menggunakan lima angka penilaian. Penilaian dalam kuesioner sebagai berikut:

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Netral (N)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

Tabel 3. 1 Pengukuran Skala Likert

Kategori Jawaban	Bobot
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Indrianto dan Supomo, 2014

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan 3 jenis variabel yakni variabel dependen, variabel independen dan variabel moderating. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh antara variabel dependen yaitu persepsi mengenai kecenderungan kecurangan (*fraud*) dengan variabel independen yaitu faktor-faktor yang memengaruhi kecenderungan kecurangan seperti kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian intern pemerintah, komitmen organisasi dan kompetensi serta mengetahui apakah moralitas individu dapat memperkuat atau memperlemah kecurangan.

3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indrianto dan Supomo, 2014:63). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah persepsi pegawai di wilayah pemerintahan desa mengenai kecurangan (*fraud*) yang sering terjadi khususnya di sektor pemerintahan. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert 1 sampai 5. Indikator dalam pengukuran kecurangan mengacu pada *Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE) yang dikembangkan oleh Mustikasari (2013), Oktavia (2016), dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan lima item pernyataan. Variabel kecurangan (*fraud*) diukur dengan indikator sebagai berikut:

- a) Kecurangan laporan keuangan
- b) Penyalahgunaan aset
- c) Korupsi

3.5.2 Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau memengaruhi variabel lain (Indrianto dan Supomo, 2014:63). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah variabel yang didasarkan atas teori *fraud diamond*.

1. Kesesuaian Kompensasi

Kesesuaian kompensasi merupakan persepsi pegawai tentang balas jasa yang diterima baik berupa uang maupun barang sebagai penghargaan atas kontribusi yang diberikan kepada instansi. Pengukuran variabel ini

menggunakan skala likert 1 sampai 5, di mana 1 untuk sangat tidak setuju, 5 untuk sangat setuju. Indikator dalam pengukuran kesesuaian kompensasi mengacu pada indikator yang dikembangkan oleh peneliti dari Mustikasari (2013), Afsari (2016), Oktavia (2018), dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan enam item pernyataan. Indikator pengukuran kesesuaian kompensasi adalah sebagai berikut:

- a) Kompensasi keuangan
- b) Pengakuan instansi atas keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan
- c) Promosi
- d) Penyelesaian tugas
- e) Pencapaian sasaran
- f) Pencapaian pribadi

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert 1 sampai 5, di mana 1 untuk sangat tidak setuju, 5 untuk sangat setuju. Indikator dalam pengukuran SPIP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dikembangkan Mustikasari (2013), Afsari (2016), Oktavia (2018), dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan lima item pernyataan. Indikator pengukuran SPIP adalah sebagai berikut:

- a) Lingkungan pengendalian
- b) Penilaian risiko
- c) Aktivitas pengendalian
- d) Informasi dan komunikasi
- e) Pemantauan pengendalian intern

3. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan sikap serta persepsi karyawan yang menggambarkan loyalitasnya kepada organisasi serta mengharapkan tercapainya tujuan organisasi. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert 1 sampai 5, di mana 1 untuk sangat tidak setuju, 5 untuk sangat setuju. Indikator dalam pengukuran komitmen organisasi mengacu pada indikator yang telah dikembangkan oleh Mustikasari (2013), Afsari (2016), dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan delapan item pernyataan. Indikator pengukuran komitmen organisasi adalah sebagai berikut:

- a) Bekerja melalui target
- b) Gembira memilih bekerja pada organisasi
- c) Menerima semua tugas
- d) Kesamaan nilai
- e) Bangga menjadi bagian organisasi
- f) Membanggakan organisasi pada orang
- g) Organisasi merupakan inspirasi
- h) Peduli pada nasib organisasi

4. Kompetensi

Kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang yang mengindikasikan cara berfikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert 1 sampai 5, di mana 1 untuk sangat tidak setuju, 5 untuk sangat setuju. Indikator dalam pengukuran kompetensi mengacu pada indikator yang telah dikembangkan oleh Oktavia (2018) dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuh item pernyataan. Indikator pengukuran kompetensi adalah sebagai berikut:

- a) Pemahaman terhadap cara kerja, prosedur kerja, proses kerja
- b) Pemahaman terhadap rencana dan target kerja
- c) Pemahaman proses kerja pada bagian lain

- d) Pemahaman atau kemampuan tentang situasi dan permasalahan organisasi
- e) Kemampuan penyesuaian diri, pengendalian diri dan bekerja sama
- f) Kemampuan dalam menyampaikan gagasan dan pokok pikiran
- g) Penguasaan terhadap peralatan dan teknologi informasi

3.5.3 Variabel Moderating

Variabel moderating merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen (Indrianto dan Supomo, 2014:64). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel moderating adalah moralitas pegawai di wilayah pemerintahan desa. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert 1 sampai 5, di mana 1 untuk sangat tidak setuju, 5 untuk sangat setuju. Indikator dalam pengukuran kompetensi mengacu pada indikator yang telah dikembangkan oleh Aranta (2013) dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan enam item pernyataan. Indikator pengukuran kompetensi adalah sebagai berikut:

- a) Tindakan
- b) Sikap
- c) Pemahaman hukum
- d) Keadilan

3.6 Uji Instrumen

3.6.1 Metode Statistik Deskriptif

Statistika Deskriptif dalam Ghazali (2011:19) menjelaskan bahwa statistika deskriptif memberikan deskripsi atau gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi).

3.6.2 Uji Kualitas Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda (*multiple regression linier*). Hasil analisis regresi linier berganda akan memiliki nilai hanya jika seluruh asumsi yang digunakan dapat diterima. Sehingga seluruh asumsi yang akan digunakan harus diuji keabsahannya untuk menguji validitas

model. Uji keabsahan yang dilakukan dengan menggunakan uji kualitas dari uji validitas dan uji reliabilitas.

3.6.2.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kecermatan suatu item yang ingin diukur pada suatu kuesioner. Pada penelitian ini menggunakan metode korelasi *product moment pearson* yakni dengan cara mengorelasikan skor item dengan skor totalnya. Skor total merupakan penjumlahan dari seluruh item pada suatu variabel. Pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan R tabel pada tingkat signifikansi 0,05. Apabila nilai positif dan R hitung \geq R tabel maka item dapat dinyatakan valid (Priyatno 2017:64).

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat ukur yang digunakan mengetahui konsistensi alat ukur pada suatu kuesioner. Dengan kata lain, alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika dilakukan pengukuran kembali. Mengukur reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha* (α). Kriteria pengujian adalah jika koefisien alpha (α) $>$ 0,60 maka instrumen yang digunakan dapat dikatakan reliabel (Priyatno 2017:79).

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Data yang telah dideskripsikan dan telah diuji kualitas data, selanjutnya adalah melakukan pengujian asumsi klasik.

3.6.3.1 Uji Normalitas Data

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu (*error*) atau residual mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2011:160). Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Analisis grafik dan uji statistik merupakan cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini untuk menguji normalitas residual dengan menggunakan uji statistik non parametric *kolmogorov-smirnov*, karena *kolmogorov-smirnov* lebih tepat untuk sampel yang lebih dari 50. Kriteria pengambilan keputusan jika *asympt.sig* $>$ 0,05 berarti data sampel diambil terdistribusi normal dan sebaliknya jika

asympt.sig < 0,05 berarti data sampel diambil tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2011:32).

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali 2011:105). Dalam mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dengan cara menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90). Namun, tidak adanya korelasi yang tinggi juga tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena adanya efek dua atau lebih variabel independen. Uji multikolinearitas juga dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *Varians Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Pada umumnya nilai cutoff yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih dari 10 (Ghozali 2011:106).

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Bila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dapat disebut homoskedastisitas, sebaliknya jika terdapat perbedaan dari pengamatan ke pengamatan lain maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik ditunjukkan dengan homoskedastisitas, atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat *scatter plot* antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Jika titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali 2011:139).

3.6.4 Uji Regresi

Pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dan *moderated regression analysis* (MRA). Regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, X_3, \dots) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah dari masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Moderated regression analysis (MRA) untuk mengidentifikasi ada tidaknya variabel moderator. Variabel moderating adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:223). MRA memiliki persamaan regresi yang mengandung unsur interaksi perkalian dua atau lebih variabel independen yakni antara variabel independen dan moderasinya (Liana, 2009). Pengujian dengan MRA dilakukan dengan beberapa tahap yakni:

- Menganalisis model regresi penelitian dengan memasukkan variabel independen, moderasi sebagai independen, dan variabel dependen.
- Menganalisis model regresi penelitian dengan memasukkan variabel independen, variabel moderasi sebagai independen, dan interaksi antara variabel independen dan moderasi (MRA) dan dependen.

Pengujian dengan MRA dilakukan dengan beberapa tahap yakni:

$$\text{Persamaan I} = Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

$$\text{Persamaan II} = Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_1 X_5 + \beta_6 X_2 X_5 + \beta_7 X_3 X_5 + \beta_8 X_4 X_5 + e$$

Keterangan:

Y = *Fraud*

α = Konstanta

- β = Koefisien Regresi
 X_1 = Kesesuaian Kompensasi
 X_2 = Penegakan Peraturan
 X_3 = Komitmen Organisasi
 X_4 = Kompetensi
 X_5 = Moralitas Individu
e = Kesalahan regresi (*error*)

3.6.5 Uji Hipotesis

Setelah melakukan dan lulus dari semua pengujian asumsi klasik maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian atas hipotesis, hasil pengujian atas hipotesis akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait dengan hubungan antara variabel dependen dan independen. Terdapat dua pengujian yang akan dilakukan pada tahap ini.

3.6.5.1 Uji F

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dengan Uji F ini menggunakan tingkat signifikansi (*significance level*) sebesar 5% atau 0,05. apabila *significance level* >0,05 maka hipotesis ditolak artinya variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika *significance level* <0,05 maka hipotesis diterima dan dapat diartikan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali 2011:98).

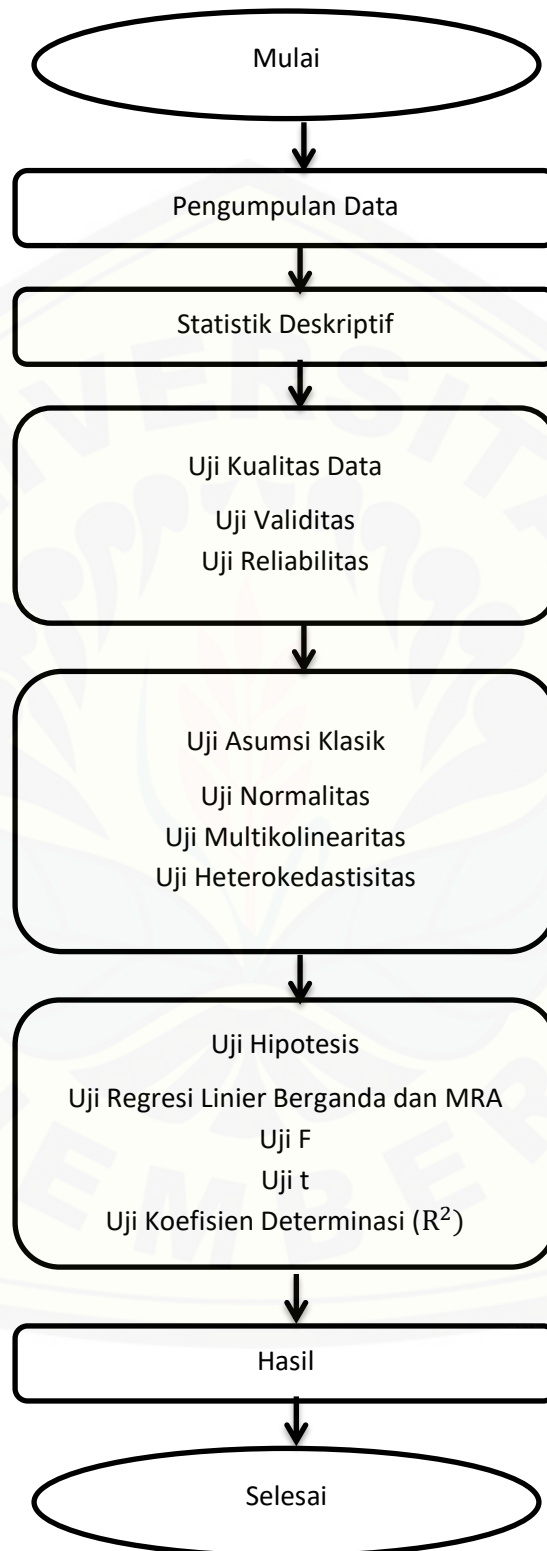
3.6.5.2 Uji t

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05. Jika *significance level* berada diatas 0,05 maka hipotesis ditolak atau dapat diartikan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, jika *significance level* berada di bawah 0,05 maka hipotesis diterima atau dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (Ghozali 2011:98).

3.6.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Semakin tinggi nilai R^2 dari model regresi maka hasil regresi semakin baik. Nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati satu artinya variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya. Penggunaan koefisien determinasi memiliki kelemahan dasar yaitu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Nilai Adjusted R^2 mampu naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali 2011:97).

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah



Gambar 3. 1 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kompensasi, maka kecurangan (*fraud*) tidak akan mengalami perubahan. Menurut responden pemberian kompensasi yang akan diterima adalah mutlak kewenangan pemerintah yang disesuaikan dengan jabatan atau golongan.
2. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Ini membuktikan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), maka kecurangan (*fraud*) semakin menurun.
3. Hasil penelitian menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Ini membuktikan bahwa semakin baik komitmen organisasi, maka kecurangan (*fraud*) semakin menurun.
4. Hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Ini membuktikan bahwa semakin tinggi kompetensi, maka kecurangan (*fraud*) tidak akan mengalami perubahan. Tinggi rendahnya kompetensi bukan penyebab terjadinya kecurangan karena kasus kecurangan tidak memandang latar belakangnya.
5. Hasil penelitian menyatakan bahwa moralitas individu dalam memoderasi kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Ini membuktikan bahwa moralitas individu tidak dapat memoderasi pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan (*fraud*). Hal ini disebabkan adanya tekanan atau peluang yang muncul sehingga moralitas tidak bisa memengaruhi kecurangan.
6. Hasil penelitian menyatakan bahwa moralitas individu dalam memoderasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Ini membuktikan bahwa moralitas individu mampu

memperkuat pengaruh negatif sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kecurangan (*fraud*).

7. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa moralitas individu dengan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Ini membuktikan bahwa moralitas individu mampu memperkuat pengaruh negatif komitmen organisasi terhadap kecurangan (*fraud*).
8. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa moralitas individu dengan kompetensi berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*). Ini membuktikan bahwa moralitas individu tidak dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kecurangan (*fraud*). Hal ini disebabkan adanya tekanan atau peluang yang muncul sehingga moralitas tidak bisa memengaruhi kecurangan.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang memengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan tersebut adalah

1. Data yang diperoleh dari sebaran kuesioner tidak dapat kembali secara utuh dan tidak semua kuesioner dapat diolah dikarenakan kurangnya keseriusan perangkat desa dalam mengisi kuesioner, sehingga hasil yang didapat kurang maksimal.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), komitmen organisasi, dan kompetensi sebagai variabel independen dan moralitas individu sebagai variabel moderating.
3. Kuesioner yang digunakan dalam mengukur peluang (*opportunity*) yang diproyeksikan dalam sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) kurang tepat, karena terdapat 3 pernyataan yang memiliki jawaban pasti.
4. Dasar pemilihan objek penelitian sebagian hanya berdasarkan dugaan terjadinya korupsi.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Desa yang dijadikan objek penelitian, terbuka dan mengisi kuesioner dengan sungguh-sungguh, sehingga hasil yang didapat dapat mencerminkan keadaan sebenarnya.
2. Bagi pemerintah desa di Kecamatan Sukorambi, Kecamatan Balung dan Kecamatan Puger diharapkan dapat meningkatkan sistem pengendalian intern pemerintah dan komitmen karena hal tersebut dapat meminimalisir adanya kecurangan (*fraud*) di lingkungan pemerintahan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah atau mengganti variabel untuk meneliti kemungkinan terjadinya kecurangan. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengobservasi atau memperhatikan keadaan objek penelitian yang memungkinkan adanya variabel lain yang mungkin memengaruhi kecurangan (*fraud*) di lingkungan pemerintahan.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan sebelum melakukan penyebaran kuesioner lebih memperhatikan dan menyesuaikan masing-masing pernyataan agar hasil penelitian dapat mencerminkan keadaan sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Moh Risqi., Ardiyani, Komala., dan Ardaningsih, Arum. 2016. *Analisis Faktor-faktor Penentu Kecurangan (Fraud) Pada Sektor Pemerintahan (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan)*. Jurnal Litbang Kota Pekalongan Vol. 10.
- Adinda, Yanita Maya dan Ikhsan Sukardi. 2015. *Faktor Yang Memengaruhi Terjadinya Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Klaten*. Accounting Analysis Journal 4.
- Afsari, Siti Fitriani. 2016. *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintahan Berdasarkan Teori Fraud Triangle: Persepsi Pegawai Pemerintahan (Studi Pada SKPD Di Kabupaten Jember)*. Skripsi.
- Anisykurlillah, Indah. 2018. *Analisis Moralitas Individu Dalam Memoderasi Determinan Kecurangan Akuntansi*. JRKA Volume 4 Isue 2: 54-66.
- Association of Certified Fraud Examiner. 2017. *Survei Fraud Indonesia 2016*.
- Atmadja, Anantawikrama Tunga dan Saputra, Komang Adi Kurniawan. 2017. *Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol.12.
- Beritagar.id. Penindakan Kasus Korupsi 2015-2018. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-penindakan-kasus-korupsi-2015-2018-1555299960> [diakses pada 28 Mei 2019].
- Faisal, Muhammad. 2013. *Analisis Fraud Di Sektor Pemerintahan Kabupaten Kudus*. Accounting Analysis Journal 2 (1).
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

IIA. 2016. Standar Internasional Praktik Professional Audit Internal (Standar)

Indonesia Corruption Watch. *Korupsi Dana Desa dan Kepala Daerah 2017*.
<https://antikorupsi.org/id/infografis> [diakses pada 24 April 2019].

Indonesia Corruption Watch. *2017 Jumlah Kasus Korupsi Menanjak Naik*.
<https://antikorupsi.org/id/infografis> [diakses pada 24 April 2019].

Indriantoro, N., dan Bambang Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Kaihatu, Thomas S. 2006. *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol 8. No 1: 1-9.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kenneth, N. Wexley dan Yuki, Gari A. 2003. *Perilaku Organisasi dan Psikologi Personal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Kuntadi, Cris. 2017. *Sikencur (Sistem Kendali Kecurangan) Menata Birokrasi Bebas Korupsi*. Jakarta. PT Gramedia.

Kohlberg, Lawrence. (1971). *Stages of Moral Development*.
<http://info.psu.edu.sa/psu/math/Stages%20of%20Moral%20Development%20According%20to%20Kohlberg.pdf> [diakses pada 25 Januari 2020]

Liana, L. 2009. *Penggunaan MRA dengan SPSS untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan Antara Variabel Independen dan Variabel Dependen*. Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK. Vol. 14, No 2, Hal : 90-97.

Liyanarachchi, Gregory and Newdick, Chris. 2009. *The Impact of Moral Reasoning and Retaliation on Whistle-Blowing: New Zealand Evidence*. Journal of Business Ethics, 89: 37-57.

Luqmanto, Gandhi. 2016. *Program ADD dan DD Desa Sukorambi Dilaporkan Ke Kejari* Jember.

http://rri.co.id/post/berita/338742/daerah/program_add_dan_dd_desa_sukor_ambi_dilaporkan_ke_kejari_jember.html [diakses pada 24 April 2019].

McClelland, DC. 1973. *Testing For Competence Rather Than For "Intelligence"*. American Psychologist Vol 28.

Mustikasari, Dhermawati Putri. 2013. *Persepsi Pegawai Dinas Se-Kabupaten Batang Tentang Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kecurangan (Fraud)*. Skripsi

Oktavia, Trisna Ayu. 2018. *Determinan Kecurangan Berbasis Diamond Fraud Dan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Lumajang*. Tesis.

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Priyatno, Duwi. 2017. *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Rachman, Dylan Aprialdo. 2018. *KPK Bantu Polres Jember Lacak Buronan Kasus Korupsi*.
<https://nasional.kompas.com/read/2018/08/16/14513801/kpk-bantu-polres-jember-lacak-buronan-kasus-korupsi> [diakses pada 22 September 2019].

Rae, Kirsty dan Subramaniam, Nava. 2008. *Quality Of Internal Control Procedures: Antecedents and Moderating Effect On Organisational Justice And Employee Fraud*. Managerial Auditing Journal Vol. 23 Iss 2 pp. 104 – 124.

Robbins, Stephen P dan Judge, Timothy A. 2017. *Perilaku Organisasi Edisi 16*. Jakarta. Salemba Empat.

Robbins, Stephen P dan Judge, Timothy A. 2008. *Perilaku Organisasi Edisi 12*. Jakarta. Salemba Empat.

- Sari, Diana. 2012. *Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis.
- Sudiono, Aries. 2018. *Dua Pejabat Pemkab Jember Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah*. <https://www.beritasatu.com/nasional/503931/dua-pejabat-pemkab-jember-jadi-tersangka-kasus-korupsi-dana-hibah> [diakses pada 2019].
- Taher, Andrian Pratama. 2019. *Indeks Persepsi Korupsi 2018: Indonesia Peringkat ke-89 Dunia*. <https://tirto.id/indeks-persepsi-korupsi-2018-indonesia-peringkat-ke-89-dunia-dfl9> [diakses pada 28 Mei 2019].
- Tim Jawa Pos. 2018. *KPK Sukses Bekuk 29 Kepala Daerah, Rekornya Ada Di Jatim*. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/16/12/2018/kpk-sukses-bekuk-29-kepala-daerah-rekornya-ada-di-jatim/> [diakses pada 27 April 2019].
- Tim Jawa Pos. 2019. *Jumlah Kasus Korupsi Anggaran Desa, Salah Satu Modusnya Laporan Fiktif*. <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/17/11/2019/jumlah-kasus-korupsi-anggaran-desa-salah-satu-modusnya-laporan-fiktif/> [diakses pada 27 November 2019].
- Tim Radar Jember. 2019. *Mantan Kades Balung Kidul Dipolisikan*. <https://radarjember.jawapos.com/2019/08/09/mantan-kades-balung-kidul-dipolisikan/> [diakses pada 19 September 2019].
- Tim Sorottransx. 2019. *Diduga Gelapkan Tanah Kas Desa Mantan Kades Curahlele Balung Jember Terancam Dipolisikan*. <https://www.sorottransx.com/2019/05/diduga-gelapkan-tanah-kas-desa-mantan-kades-curahlele-balung-jember-terancam-dipolisikan/> [diakses pada 19 September 2019].
- Tuanakotta, Theodorus M. 2015. *Audit Kontemporer*. Jakarta. Salemba Empat.

- Wijayanti, Provita dan Hanafi, Rustam. 2018. *Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Vol 9 No 2 Halaman 331-345.
- Wilopo. 2006. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Kasus pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi IX.
- Wolfe, David T dan Hermanson, Dana R. 2004. *The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud*. CPA Journal 74.12 (2004): 38-42.
- Yudistira, I Gusti Agung., Sujana, Edy., dan Yuniarta., Gede Adi. 2017. *Pengaruh Aspek Tekanan, Penegakan Peraturan, Rasionalisasi, Dan Wewenang Pegawai Terhadap Fraud*. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Vol 8 No 2.
- Yuskar dan Devisia, Selly. 2011. *Pengaruh Independensi, Auditor. Komitmen Organisasi, Pemahaman Good Governance, Intgritas Auditor, Budaya Organisasi dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik Big Four yang Berafiliasi di Indonesia Tahun 2011)*. SNA XIV Aceh.
- Zainal, Veithzal, Ramly., Ramly, Mansyur., Mutis, Thoby., dan Arafah, Willy. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Zainudin, Arif. 2016. *Model Kelembagaan Pemerintahan Desa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator	Pertanyaan Nomor
1	Kesesuaian Kompensasi (Mustikasari, 2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompensasi keuangan 2. Pengakuan perusahaan 3. Promosi 4. Penyelesaian tugas 5. Pencapaian sasaran 6. Pencapaian pribadi 	1,2,3, 4,5,6
2	Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (PP No 60 Tahun 2008)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Aktivitas pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan 	7,8,9,10,11
3	Komitmen Organisasi (Afsari, 2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerja melalui target 2. Gembira memilih bekerja pada organisasi 3. Menerima semua tugas 4. Kesamaan nilai 5. Bangga menjadi bagian organisasi 6. Membanggakan organisasi pada orang 7. Organisasi merupakan inspirasi 8. Peduli pada nasib organisasi 	12,13,14,15, 16,17,18,19
4	Kompetensi (Oktavia, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman terhadap cara kerja, prosedur kerja proses kerja 2. Pemahaman terhadap rencana dan target kerja 3. Pemahaman proses kerja pada bagian lain 4. Pemahaman/kemampuan tentang situasi dan permasalahan organisasi 5. Kemampuan penyesuaian diri, 	20,21,22, 23,24,25,26

		pengendalian diri dan bekerja sama 6. Kemampuan dalam menyampaikan gagasan dan pokok pikiran 7. Penguasaan terhadap peralatan dan teknologi informasi	
5	Kecurangan (<i>Fraud</i>) di sektor pemerintahan (Oktavia, 2018)	1. Kecurangan laporan keuangan 2. Penyalahgunaan aset 3. Korupsi	27,28,29,30,31
6	Moralitas Individu (Aranta, 2013)	1. Tindakan 2. Sikap 3. Pemahaman hukum 4. Keadilan	32, 33, 34, 35, 36, 37

LAMPIRAN 2 Kuesioner Penelitian

Kepada Yth,

Bapak/Ibu/Sdr/I/Pegawai Pemerintah Desa

Di tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurikke Agus Fitriani

NIM : 160810301103

Program Studi : Akuntansi

Perguruan Tinggi : Universitas Jember

Memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Sdr/I untuk kiranya dapat berpartisipasi dalam mengisi kuesioner penelitian berikut, berkaitan dengan penyusunan skripsi yang saya lakukan dalam rangka menyelesaikan Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dengan judul “Analisis Faktor Yang Memengaruhi Kecurangan (*Fraud*) Dan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderating”.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Oleh karena itu, dimohon kesediaannya untuk mengisi/menjawab kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya. Kuesioner ini hanya untuk keperluan skripsi tidak untuk dipublikasikan secara luas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat dijaga.

Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu/Saudara/I dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

Nurikke Agus Fitriani

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : (boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Nama Instansi :
4. Jabatan : Kepala Desa Sekretaris Desa
 Kasi Pelayanan Umum Kasi Kesejahteraan Rakyat
 Kasi Pemerintahan Kaur Keuangan
 Kaur Umum Kaur Perencanaan
5. Masa Kerja :
6. Pendidikan Terakhir : SMA D3 S1 S2 S3 lainnya

Beri tanda checklist (√) pada pilihan yang tersedia

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berikut ini merupakan pernyataan-pernyataan yang mewakili pendapat-pendapat umum mengenai kondisi di dalam instansi saudara. Tidak ada pernyataan benar atau salah. Saudara mungkin saja setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan tersebut. Kami ingin mengetahui seberapa jauh Saudara setuju atau tidak setuju terhadap pernyataan tersebut, dengan memberikan tanda checklist (√) pada pilihan yang tersedia sebagai berikut:

Penilaian:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

I. PERNYATAAN KUESIONER

Kesesuaian Kompensasi						
No	Pernyataan	Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
1	Tunjangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan saya					
2	Di pemerintah desa ini, insentif diberikan dalam keberhasilan pencapaian kinerja					
3	Di pemerintah desa ini, promosi/kenaikan jabatan diberikan atas dasar prestasi kerja yang telah dicapai para pegawai.					
4	Pemerintah desa ini dikelola agar para pegawainya menyelesaikan tugas pekerjaan dengan baik					
5	Pekerjaan saya di pemerintah desa ini merupakan tugas yang menantang yang harus dicapai dalam waktu tertentu					
6	Di pemerintah desa ini, saya dapat memaksimalkan kemampuan, pengetahuan, dan keahlian					

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah						
No	Pernyataan	Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
7	Di pemerintah desa ini, sudah ada pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab yang jelas					
8	Di pemerintah desa ini, telah memiliki kebijakan penilaian risiko (identifikasi risiko) yang ditetapkan secara formal					
9	Di pemerintah desa ini, pencatatan seluruh transaksi berdasarkan sistem keuangan desa					
10	Di pemerintah desa ini, APBDesa yang disahkan oleh kepala desa di musyawarakan dengan BPD					
11	Di pemerintah desa ini, telah memiliki SOP yang memuat pengendalian					

Komitmen Organisasi						
No	Pernyataan	Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
12	Saya bersedia untuk bekerja lembur agar pemerintah desa ini berhasil sukses					
13	Saya lebih memilih untuk bergabung dengan pemerintah desa sebagai tempat saya bekerja daripada instansi lainnya					
14	Saya bersedia menerima segala bentuk penugasan agar tetap bisa bekerja di pemerintah desa ini					
15	Prinsip nilai kinerja saya sejalan dengan prinsip nilai kinerja di pemerintah desa ini					
16	Saya merasa bangga menjadi bagian dari pemerintah desa ini					
17	Saya merasa bangga saat memperkenalkan pada orang lain bahwa pemerintah desa tempat saya bekerja adalah instansi yang baik					
18	Pemerintah desa ini benar-benar memberi inspirasi yang bagus bagi saya untuk berprestasi					
19	Saya sangat peduli terhadap nasib pemerintah desa ini					

Kompetensi						
No	Pernyataan	Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
20	Saya memahami apa yang menjadi tanggungjawab jabatan dalam rangka pencapaian tujuan instansi pemerintah desa					
21	Di pemerintah desa ini, saya memahami apa yang menjadi visi/misi instansi pemerintah desa					
22	Di pemerintah desa ini, saya memahami proses kerja bidang lain					
23	Di pemerintah desa ini, saya terbiasa bekerja dalam tim					
24	Di pemerintah desa ini, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan dalam permasalahan instansi					
25	Di pemerintah desa ini, saya dituntut untuk memahami permasalahan					
26	Di pemerintah desa ini, seringkali ada pegawai yang kurang mampu dalam memahami proses kerja berbasis teknologi (komputer)					

Kecurangan (<i>Fraud</i>)						
No	Pernyataan	Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
27	Merupakan sesuatu yang wajar di pemerintah desa ini apabila pengguna anggaran memasukkan kebutuhan perbaikan bangunan pribadi ke dalam akun belanja.					
28	Suatu hal yang wajar apabila di pemerintah desa ini, para pengguna anggaran menggunakan kuitansi kosong atas pembelian bahan perlengkapan					
29	Bukan suatu masalah bagi pemerintah desa ini, apabila sisa anggaran diambil pimpinan sebagai keuntungan pribadi					
30	Di pemerintah desa ini, kelompok belanja sesuai dengan kebutuhan desa yang tertuang dalam RKPDesa					
31	Di pemerintah desa ini, dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa					

Untuk menjawab nomor 32 sampai dengan 37 Bapak/Ibu diberikan sebuah kasus yang tidak terjadi sebenarnya. Berikan jawaban yang menurut Bapak/Ibu paling sukai.

Amir Mandala, AK merupakan seorang staff akuntansi yang baru saja dipindah tugaskan ke Desa Sukoharjo. Selama tiga tahun Laporan Keuangan di Desa Sukoharjo diaudit oleh BPK. Hasil audit selalu memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selama tiga bulan bekerja di Desa Sukoharjo, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belum memperlihatkan keadaan yang sebenarnya. Masih terdapat beberapa program yang tidak jalan, sehingga menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi batas anggaran tapi program pembangunan belum sepenuhnya berjalan.

Mengetahui hal ini Amir Mandala, AK menyampaikan permasalahan tersebut kepada kepala desa. Namun kepala desa meminta kepada Amir

Mandala, AK untuk tidak mengubah proses penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah berjalan. Amir Mandala, AK diminta untuk menyelesaikan LRA tersebut dengan tetap menunjukkan bahwa LRA telah digunakan dengan sebaik-baiknya dan pembangunan-pembangunan telah dilakukan dengan semestinya. Kepala desa juga menyatakan akan memberikan bonus kepada Amir Mandala, AK serta janji untuk dipromosikan.

Amir Mandala, AK menyarankan agar kepala desa mempertimbangkan untuk menunjukkan gambaran kegiatan pembangunan yang telah tercapai, dan agar tidak terkena sanksi Undang-Undang, termasuk agar mempertimbangkan prinsip kesejahteraan masyarakat, serta tidak merugikan para pegawai lainnya.

Nilailah keputusan Kepala Desa tempat Bapak/Ibu bekerja bila kondisi yang dihadapi oleh Amir Mandala, AK terjadi di Pemerintahan Desa tempat Bapak/Ibu bekerja.

Moralitas						
No	Pernyataan	Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
32	Kepala Desa tetap menyelesaikan Laporan Realisasi Anggaran seperti periode yang lalu untuk kepentingannya					
33	Kepala Desa memberikan bonus kepada staf akuntansinya karena telah patuh					
34	Kepala Desa tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran seperti periode yang lalu agar kinerjanya bagus dan terlihat baik					
35	Kepala Desa menyusun Laporan Realisasi Anggaran seperti periode yang lalu karena sudah menjadi kelaziman di pemerintahannya					
36	Kepala Desa menyusun Laporan Realisasi Anggaran seperti yang sebenarnya, karena pegawai takut terkena sanksi Undang-Undang					
37	Kepala Desa menyusun Laporan Realisasi Anggaran seperti kondisi yang sebenarnya demi mempertimbangkan prinsip kesejahteraan masyarakat serta tidak merugikan pemerintah					

LAMPIRAN 3 Rekapitulasi Jawaban Responden

	Kesesuaian Kompensasi (X1)						Total X1	SPIP (X2)					Total X2
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	
X1	4	4	5	5	4	4	26	4	4	4	4	4	20
X2	2	4	4	4	4	4	22	4	4	1	1	4	14
X3	4	4	4	4	4	4	24	1	4	1	1	4	11
X4	4	3	4	5	5	4	25	4	3	4	4	3	18
X5	2	2	2	2	4	4	16	4	2	4	4	2	16
X6	3	3	4	4	4	5	23	4	2	4	5	4	19
X7	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20
X8	4	4	4	4	2	5	23	4	2	4	5	2	17
X9	4	2	5	4	4	5	24	4	5	5	5	4	23
X10	4	4	5	4	5	4	26	5	4	4	5	4	22
X11	4	4	5	4	4	5	26	5	4	5	5	4	23
X12	4	4	5	5	4	4	26	5	4	5	4	4	22
X13	4	4	4	5	4	4	25	5	4	4	5	4	22
X14	4	4	4	4	4	4	24	5	4	5	5	5	24
X15	4	5	5	5	4	4	27	5	5	4	5	5	24
X16	4	5	5	5	4	4	27	5	5	4	5	5	24
X17	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20
X18	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20
X19	4	3	4	4	3	4	22	5	3	4	5	4	21
X20	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20
X21	4	4	4	5	5	5	27	4	4	5	5	5	23
X22	2	1	1	1	2	1	8	1	1	1	1	4	8
X23	5	4	4	4	5	5	27	5	4	4	5	5	23
X24	4	5	5	5	5	5	29	5	3	5	5	5	23
X25	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20
X26	5	5	5	5	5	5	30	5	3	5	5	5	23
X27	4	4	4	4	3	4	23	4	4	4	4	4	20
X28	4	4	4	4	4	4	24	4	3	4	5	4	20
X29	4	4	3	4	3	4	22	4	3	4	5	4	20
X30	5	4	4	4	3	4	24	5	4	5	4	4	22
X31	4	4	3	4	4	4	23	4	4	4	5	4	21
X32	4	3	3	4	4	4	22	4	4	5	4	3	20
X33	4	4	2	4	2	4	20	4	3	4	5	4	20
X34	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20
X35	4	4	3	4	4	4	23	4	4	4	4	4	20
X36	4	4	3	4	4	4	23	4	4	4	4	4	20
X37	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20
X38	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20

X39	4	4	4	4	3	4	23	5	4	4	4	4	21
X40	4	4	3	4	3	5	23	4	4	4	4	4	20
X41	4	4	4	4	3	4	23	4	4	4	4	4	20
X42	4	4	4	4	5	5	26	4	4	4	4	4	20
X43	4	5	4	4	4	4	25	4	4	4	4	4	20
X44	4	2	4	4	2	4	20	4	4	4	4	4	20
X45	4	4	4	4	4	4	24	4	3	4	4	4	19
X46	4	4	4	4	4	4	24	4	2	4	4	4	18
X47	4	4	4	4	4	4	24	5	4	5	5	4	23
X48	4	4	4	4	4	4	24	4	2	1	5	4	16
X49	4	5	5	4	5	5	28	5	3	4	5	4	21
X50	4	5	5	5	5	4	28	4	4	4	5	4	21
X51	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20
X52	4	3	3	4	3	3	20	4	4	4	4	4	20
X53	5	4	3	4	3	3	22	4	4	5	5	4	22
X54	5	5	5	5	5	5	30	5	4	5	5	4	23
X55	3	3	3	4	4	3	20	4	3	4	5	4	20
X56	5	4	4	4	4	4	25	5	4	5	5	4	23
X57	5	4	4	5	5	4	27	5	3	4	5	4	21
X58	5	5	4	5	3	5	27	5	3	4	5	4	21
X59	4	4	3	4	3	5	23	4	2	4	5	4	19
X60	4	5	5	5	4	4	27	4	4	4	5	5	22
X61	4	4	4	4	4	4	24	5	4	5	5	4	23
X62	4	4	3	4	3	5	23	4	2	4	5	4	19
X63	4	5	5	5	4	4	27	4	4	4	5	5	22
X64	4	4	5	5	5	4	27	4	4	5	5	4	22
X65	4	4	5	5	5	4	27	4	4	5	5	4	22
X66	4	5	5	5	4	4	27	4	4	4	4	4	20
X67	4	4	3	4	3	4	22	4	3	4	4	4	19
X68	4	4	5	4	3	4	24	4	3	4	4	4	19
X69	4	4	5	4	4	4	25	5	4	4	5	5	23
X70	4	4	4	4	4	5	25	5	4	4	5	5	23
X71	4	4	4	4	4	5	25	5	4	4	5	4	22
X72	4	4	5	4	4	4	25	4	4	4	5	4	21
X73	4	3	4	4	4	4	23	5	4	4	5	5	23
X74	4	4	5	4	4	5	26	5	4	4	5	5	23
X75	4	4	4	4	4	4	24	5	4	2	5	4	20
X76	4	4	4	5	4	4	25	4	4	4	4	5	21
X77	4	5	3	4	5	5	26	5	4	4	5	4	22
X78	4	5	3	4	5	5	26	4	4	4	5	5	22
X79	4	4	4	4	4	4	24	4	3	4	4	4	19

X80	4	4	4	4	4	5	25	4	3	4	5	4	20
X81	4	2	4	4	4	4	22	5	4	4	4	4	21
X82	5	4	3	5	5	5	27	5	4	5	5	4	23
X83	5	4	3	5	5	5	27	5	4	5	5	4	23
X84	5	4	3	5	5	5	27	5	4	5	4	4	22
X85	5	4	3	5	5	5	27	5	4	5	5	3	22
X86	4	3	4	5	4	4	24	5	5	5	5	5	25
X87	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	5	4	21
X88	4	4	2	5	4	4	23	4	4	4	4	4	20
X89	4	4	4	5	4	4	25	4	4	5	5	5	23
X90	4	5	5	5	5	5	29	4	4	4	4	4	20
X91	4	4	4	5	4	4	25	4	4	4	5	4	21
X92	4	4	4	5	4	4	25	4	4	4	4	4	20
X93	4	4	2	5	4	4	23	5	4	5	5	5	24
X94	4	3	5	4	4	4	24	5	3	5	5	3	21
X95	2	4	5	4	4	4	23	4	4	4	4	4	20
X96	4	3	3	5	4	4	23	4	3	4	4	4	19
X97	4	3	3	5	4	4	23	4	3	4	4	4	19
X98	4	3	3	5	4	4	23	4	3	3	4	4	18
X99	4	4	3	3	3	4	21	3	3	5	5	3	19
X100	4	4	5	5	4	4	26	4	3	4	4	3	18
X101	4	4	4	5	4	4	25	5	4	5	5	4	23
X102	4	4	5	4	4	5	26	4	4	4	4	4	20
X103	3	4	3	4	4	4	22	5	3	5	4	5	22
X104	4	4	5	4	4	5	26	5	4	4	4	4	21
X105	5	4	5	4	4	4	26	5	4	4	4	4	21
X106	4	4	5	4	4	5	26	5	4	4	4	4	21
X107	4	4	3	4	4	4	23	5	4	4	5	4	22
X108	4	4	3	3	4	4	22	4	3	4	4	3	18
X109	4	4	3	5	4	5	25	5	3	4	5	4	21
X110	4	4	4	5	4	4	25	4	3	4	4	4	19
X111	5	4	4	4	4	4	25	2	3	4	5	4	18
X112	4	5	4	4	4	4	25	4	4	4	5	5	22
X113	4	5	4	4	4	5	26	4	4	4	5	5	22
X114	4	5	5	5	4	5	28	5	4	4	4	5	22
X115	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	20
X116	4	5	4	4	2	1	20	4	4	4	5	5	22
X117	5	3	4	3	3	3	21	5	5	5	5	5	25
X118	4	2	4	4	4	4	22	4	4	4	4	4	20
X119	2	4	3	5	5	5	24	5	5	5	5	5	25
X120	4	4	4	5	5	5	27	4	5	4	5	3	21

	Komitmen Organisasi (X3)								Total X3
	12	13	14	15	16	17	18	19	
X1	4	3	4	4	4	3	5	4	31
X2	1	4	1	5	5	1	5	4	26
X3	4	1	5	4	5	5	4	5	33
X4	2	4	2	4	4	4	4	4	28
X5	4	3	4	4	4	4	5	5	33
X6	4	4	4	4	4	4	5	5	34
X7	4	2	4	4	4	4	4	4	30
X8	5	4	4	4	4	4	5	5	35
X9	4	5	4	4	4	5	4	4	34
X10	4	4	4	4	5	4	5	4	34
X11	4	4	4	5	5	4	5	4	35
X12	4	4	4	5	4	5	4	4	34
X13	4	4	4	5	3	4	4	5	33
X14	4	4	4	4	4	5	5	5	35
X15	4	5	4	4	4	4	4	4	33
X16	4	5	4	4	4	4	4	4	33
X17	4	4	4	4	4	4	4	5	33
X18	4	4	4	4	4	4	4	5	33
X19	4	3	3	4	4	4	3	4	29
X20	4	4	4	4	5	5	4	5	35
X21	5	4	3	4	4	5	5	5	35
X22	1	3	3	1	1	4	1	1	15
X23	4	4	1	4	4	4	5	5	31
X24	3	3	4	3	5	5	5	5	33
X25	3	4	3	4	4	5	5	5	33
X26	3	3	4	3	5	5	5	5	33
X27	2	4	2	3	5	4	4	4	28
X28	2	4	4	4	5	5	5	4	33
X29	5	4	4	5	4	4	4	4	34
X30	5	4	4	3	5	4	4	5	34
X31	5	4	4	4	4	4	4	4	33
X32	4	4	3	4	5	4	5	4	33
X33	4	4	4	4	4	4	4	4	32
X34	4	3	4	4	4	4	4	4	31
X35	4	4	4	4	4	4	4	4	32
X36	4	4	4	4	4	4	4	4	32
X37	4	4	4	4	4	4	4	4	32
X38	4	4	4	4	4	4	4	4	32
X39	4	3	2	4	5	3	4	5	30

X81	5	4	4	4	4	4	4	4	33
X82	4	4	4	4	5	5	5	4	35
X83	4	4	4	4	5	5	5	4	35
X84	4	4	4	4	5	5	5	4	35
X85	4	4	4	4	5	5	5	4	35
X86	4	4	4	4	5	5	5	5	36
X87	5	5	5	5	5	5	5	5	40
X88	4	4	4	4	4	4	4	4	32
X89	4	4	4	5	4	4	5	4	34
X90	5	4	4	4	4	4	4	5	34
X91	5	4	4	4	4	4	4	4	33
X92	4	4	4	4	4	4	4	4	32
X93	4	3	4	4	5	4	5	5	34
X94	4	4	4	4	4	5	5	5	35
X95	4	4	2	3	4	4	4	4	29
X96	4	3	4	4	5	4	4	5	33
X97	4	3	4	4	5	4	4	5	33
X98	4	3	4	4	5	4	4	5	33
X99	5	3	3	3	3	3	3	3	26
X100	4	4	5	4	4	4	4	5	34
X101	5	4	5	5	5	5	4	5	38
X102	4	4	3	4	5	4	4	4	32
X103	5	5	3	4	5	4	4	4	34
X104	4	4	3	4	5	4	4	4	32
X105	4	4	3	5	4	4	5	5	34
X106	4	4	3	4	5	4	4	4	32
X107	4	4	4	4	5	5	4	4	34
X108	2	3	4	3	4	4	4	4	28
X109	4	4	4	4	5	4	4	5	34
X110	4	4	4	3	4	4	4	4	31
X111	4	4	4	4	4	4	4	4	32
X112	1	3	3	4	5	5	5	5	31
X113	1	3	3	4	5	5	5	5	31
X114	5	4	5	5	5	5	5	4	38
X115	4	4	2	4	4	2	4	4	28
X116	1	3	3	4	5	5	5	5	31
X117	5	3	3	3	4	3	3	4	28
X118	4	4	4	4	4	4	4	4	32
X119	5	4	5	4	5	5	5	5	38
X120	5	4	4	3	4	4	3	3	30

	Kompetensi (X4)							Total X4
	20	21	22	23	24	25	26	
X1	4	4	3	4	4	3	3	25
X2	4	5	1	4	4	5	2	25
X3	4	5	3	5	3	4	4	28
X4	4	4	3	3	4	4	4	26
X5	5	5	4	5	4	4	2	29
X6	5	5	5	5	5	5	1	31
X7	4	4	4	4	4	4	4	28
X8	5	5	5	5	4	5	3	32
X9	4	4	2	4	4	4	4	26
X10	4	4	3	4	4	4	3	26
X11	4	4	3	5	4	4	3	27
X12	4	5	3	5	4	5	3	29
X13	4	4	4	5	5	3	2	27
X14	5	5	4	5	5	5	4	33
X15	4	4	4	4	4	4	2	26
X16	4	4	4	4	4	4	2	26
X17	4	4	4	4	4	4	1	25
X18	4	4	4	4	4	4	1	25
X19	4	4	3	4	4	4	3	26
X20	5	5	4	5	4	4	3	30
X21	4	5	4	4	4	4	3	28
X22	4	4	4	4	3	4	3	26
X23	5	4	4	5	5	5	1	29
X24	5	5	5	5	4	4	1	29
X25	5	4	4	4	4	4	2	27
X26	5	5	5	5	4	4	1	29
X27	4	4	2	4	4	4	2	24
X28	5	4	4	4	4	4	3	28
X29	4	4	4	4	3	4	3	26
X30	5	5	3	5	4	5	2	29
X31	4	4	4	2	4	4	4	26
X32	4	4	4	5	5	4	3	29
X33	4	4	3	2	4	4	4	25
X34	4	4	4	4	4	4	2	26
X35	4	4	4	4	4	4	2	26
X36	4	4	4	4	4	4	2	26
X37	4	4	4	4	4	4	2	26
X38	4	4	4	4	4	4	2	26
X39	4	3	3	3	3	3	4	23

X40	4	4	3	4	4	4	3	26
X41	4	4	4	4	4	4	2	26
X42	4	4	4	3	4	4	2	25
X43	4	4	4	3	4	4	2	25
X44	4	4	4	4	4	4	4	28
X45	4	4	4	4	4	4	2	26
X46	4	4	4	4	4	4	2	26
X47	5	4	4	4	4	4	2	27
X48	4	4	5	1	4	4	4	26
X49	5	5	4	4	5	5	4	32
X50	4	5	5	5	4	4	1	28
X51	4	4	4	4	4	5	2	27
X52	5	5	4	5	5	5	2	31
X53	4	4	3	4	4	4	3	26
X54	5	5	5	5	5	5	1	31
X55	4	3	3	4	3	4	2	23
X56	4	4	4	4	5	4	2	27
X57	4	4	3	3	4	3	4	25
X58	5	5	4	3	5	5	2	29
X59	4	4	4	4	4	4	3	27
X60	4	4	4	4	4	4	4	28
X61	4	4	4	5	4	5	3	29
X62	4	4	4	5	4	4	3	28
X63	4	4	4	4	4	4	4	28
X64	4	4	5	4	4	5	2	28
X65	4	4	5	4	4	5	2	28
X66	4	4	4	4	4	5	4	29
X67	4	4	4	4	4	4	4	28
X68	4	4	4	4	4	4	3	27
X69	5	4	4	5	5	4	5	32
X70	4	4	4	5	5	5	4	31
X71	4	4	4	5	5	5	4	31
X72	4	4	4	5	4	4	4	29
X73	4	4	4	5	4	4	4	29
X74	4	4	4	5	4	4	5	30
X75	4	4	4	5	5	4	4	30
X76	4	4	2	4	4	4	4	26
X77	4	4	4	4	4	4	3	27
X78	5	5	5	5	5	5	3	33
X79	4	4	4	4	4	4	2	26
X80	4	4	4	4	4	5	2	27

X81	4	4	4	4	4	4	2	26
X82	5	5	3	5	5	4	4	31
X83	5	5	3	5	5	4	4	31
X84	5	5	3	5	5	4	5	32
X85	5	5	3	5	5	4	4	31
X86	5	5	3	4	4	5	4	30
X87	5	5	4	5	5	5	2	31
X88	4	4	4	4	4	5	2	27
X89	5	4	4	4	4	5	3	29
X90	4	4	4	4	4	5	4	29
X91	4	4	4	4	4	5	2	27
X92	4	4	4	4	4	5	2	27
X93	5	4	4	4	5	5	5	32
X94	4	4	3	4	4	4	2	25
X95	4	2	4	4	4	4	2	24
X96	5	4	4	5	4	4	3	29
X97	5	4	4	5	4	4	3	29
X98	4	4	4	5	4	4	3	28
X99	4	5	3	3	4	3	1	23
X100	5	4	4	4	3	3	3	26
X101	4	4	4	5	4	4	3	28
X102	4	4	4	4	4	4	3	27
X103	3	4	4	4	5	5	2	27
X104	4	4	4	5	5	4	3	29
X105	4	5	4	4	5	4	3	29
X106	4	4	4	5	5	4	3	29
X107	4	4	4	5	4	5	2	28
X108	4	4	4	4	4	4	2	26
X109	5	4	4	5	4	4	2	28
X110	4	4	3	4	5	4	4	28
X111	5	4	3	4	4	4	1	25
X112	4	5	3	4	4	4	3	27
X113	4	5	3	4	4	4	3	27
X114	4	3	3	3	3	3	5	24
X115	4	4	4	4	4	4	2	26
X116	4	5	3	4	4	4	3	27
X117	4	4	4	4	4	4	3	27
X118	4	4	4	4	4	4	2	26
X119	5	5	5	5	5	5	1	31
X120	4	4	3	4	3	3	2	23

	Moralitas (X5)						Total X5	Kecurangan (<i>Fraud</i>)					Total Y
	27	28	29	30	31	32		33	34	35	36	37	
X1	4	4	4	3	5	5	25	2	1	1	4	4	12
X2	4	4	4	2	4	5	23	4	5	1	2	2	14
X3	4	5	4	3	4	4	24	2	2	2	2	3	11
X4	1	1	1	4	4	4	15	1	2	1	2	2	8
X5	5	5	5	1	2	4	22	1	1	1	2	2	7
X6	5	3	4	2	3	5	22	1	1	1	2	1	6
X7	4	4	4	2	2	2	18	1	1	1	2	1	6
X8	5	4	4	2	2	5	22	1	1	1	1	1	5
X9	4	4	4	2	2	2	18	1	1	1	2	1	6
X10	2	2	2	3	3	5	17	2	2	3	2	2	11
X11	2	1	2	3	3	4	15	2	2	2	2	2	10
X12	2	1	2	3	4	4	16	2	1	2	2	2	9
X13	2	3	2	4	4	4	19	4	4	4	1	2	15
X14	4	4	1	5	5	5	24	2	2	2	4	4	14
X15	4	3	2	4	5	4	22	2	1	1	2	1	7
X16	4	3	2	4	5	4	22	2	1	1	2	1	7
X17	2	2	2	4	4	4	18	2	2	1	2	2	9
X18	2	2	2	4	4	4	18	2	2	1	2	2	9
X19	4	3	4	4	2	4	21	2	2	1	2	2	9
X20	3	3	3	5	3	5	22	1	1	1	3	2	8
X21	3	3	3	4	4	5	22	1	1	1	2	2	7
X22	3	3	3	4	4	5	22	1	1	2	4	3	11
X23	1	2	1	4	4	5	17	2	2	2	1	2	9
X24	2	2	4	2	5	5	20	1	3	1	1	1	7
X25	2	2	4	2	5	5	20	2	2	2	2	2	10
X26	2	2	4	2	5	5	20	1	3	1	1	1	7
X27	2	2	2	4	4	4	18	1	2	1	2	2	8
X28	2	2	1	4	5	5	19	2	2	2	2	2	10
X29	3	4	3	2	5	5	22	1	1	1	1	5	9
X30	4	4	5	1	5	5	24	1	1	1	1	1	5
X31	4	4	2	2	4	4	20	2	2	2	2	1	9
X32	2	3	2	4	4	4	19	2	1	1	1	1	6
X33	4	4	1	2	4	5	20	2	2	1	2	1	8
X34	4	4	3	3	2	4	20	3	3	3	2	2	13
X35	4	4	3	3	2	4	20	2	2	2	2	2	10
X36	4	4	3	3	2	4	20	2	2	2	2	2	10
X37	4	4	3	3	2	4	20	2	2	2	2	2	10
X38	4	4	3	3	2	4	20	2	2	2	2	2	10
X39	4	2	4	2	4	4	20	2	2	1	2	1	8

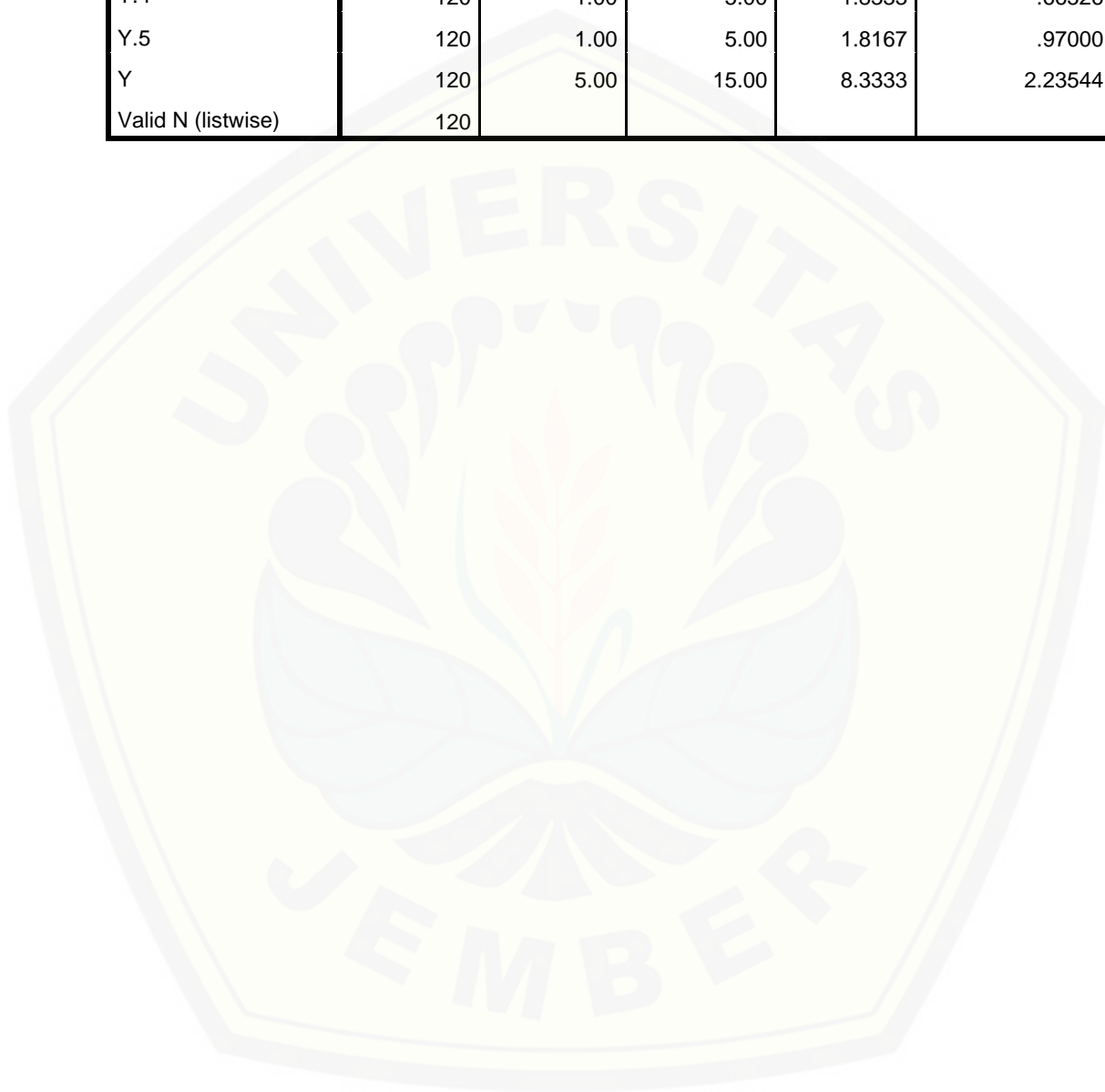
X40	3	3	2	4	4	4	20	2	2	2	2	2	10
X41	3	4	2	4	4	4	21	2	2	2	2	2	10
X42	2	4	2	4	4	4	20	2	2	2	2	2	10
X43	2	4	2	4	4	4	20	2	2	2	2	2	10
X44	2	2	2	4	4	4	18	2	2	2	2	2	10
X45	3	4	2	4	4	5	22	2	2	2	2	2	10
X46	2	3	2	4	4	5	20	2	2	2	2	2	10
X47	3	3	2	4	4	4	20	3	2	2	2	2	11
X48	2	4	5	4	5	4	24	2	2	2	2	4	12
X49	4	5	5	1	4	5	24	1	1	1	2	1	6
X50	4	4	4	2	4	5	23	1	1	1	1	1	5
X51	2	4	4	2	4	4	20	1	1	1	1	2	6
X52	4	4	4	2	4	4	22	1	1	1	1	1	5
X53	4	3	4	2	4	4	21	3	2	2	2	2	11
X54	5	5	5	1	5	5	26	2	2	2	1	1	8
X55	5	5	4	2	5	4	25	1	1	1	2	1	6
X56	5	5	5	1	5	5	26	1	1	1	1	1	5
X57	4	4	3	2	5	5	23	1	2	1	1	2	7
X58	3	4	2	4	5	5	23	1	1	2	2	2	8
X59	3	4	3	4	4	4	22	1	2	1	2	1	7
X60	2	4	2	4	4	4	20	1	1	1	1	1	5
X61	2	4	2	4	2	4	18	2	2	2	2	1	9
X62	3	4	3	4	4	4	22	2	2	2	2	1	9
X63	2	4	4	4	4	4	22	1	1	1	1	1	5
X64	2	4	4	4	4	4	22	1	2	3	2	1	9
X65	2	4	4	4	4	4	22	1	2	3	2	1	9
X66	2	4	4	4	4	4	22	1	1	1	1	1	5
X67	3	4	4	2	4	5	22	1	1	1	2	5	10
X68	3	4	4	2	4	5	22	1	1	1	2	5	10
X69	5	4	5	1	4	5	24	1	1	1	1	1	5
X70	4	5	5	2	5	5	26	1	2	1	1	1	6
X71	4	1	5	1	5	5	21	2	2	1	1	1	7
X72	4	5	5	1	1	5	21	2	1	1	2	1	7
X73	4	4	4	2	4	4	22	1	1	1	1	1	5
X74	5	4	4	2	4	4	23	1	1	1	1	1	5
X75	3	3	2	4	5	5	22	1	1	1	2	1	6
X76	2	2	2	4	2	4	16	2	2	2	2	2	10
X77	4	3	4	1	5	4	21	1	2	1	2	2	8
X78	4	3	4	2	5	5	23	1	1	1	2	1	6
X79	4	4	4	2	4	4	22	2	2	2	2	2	10
X80	4	3	3	3	4	5	22	2	1	1	2	2	8

X81	4	2	4	2	2	5	19	1	1	1	2	2	7
X82	5	5	5	2	2	5	24	1	1	1	1	1	5
X83	5	5	5	2	2	5	24	1	1	1	1	1	5
X84	5	5	5	2	2	5	24	1	1	1	1	1	5
X85	5	5	5	2	2	5	24	1	1	1	1	1	5
X86	4	4	3	3	4	4	22	1	2	1	1	1	6
X87	2	2	2	4	4	4	18	1	2	1	2	2	8
X88	2	4	4	2	4	4	20	3	2	1	2	2	10
X89	2	4	3	4	2	4	19	4	2	1	1	2	10
X90	4	3	2	2	2	4	17	1	1	1	2	2	7
X91	2	5	4	4	4	4	23	1	2	1	1	2	7
X92	2	4	2	2	4	4	18	2	1	1	2	2	8
X93	2	3	4	2	3	2	16	1	1	1	1	5	9
X94	4	3	4	3	4	4	22	1	2	1	2	2	8
X95	4	3	3	3	4	4	21	2	2	1	2	2	9
X96	4	4	4	2	3	5	22	1	2	1	2	1	7
X97	4	4	4	2	3	5	22	1	2	1	2	1	7
X98	4	3	4	2	3	5	21	1	2	1	2	2	8
X99	3	3	3	3	3	3	18	3	3	1	3	1	11
X100	3	4	4	3	3	5	22	2	2	2	2	1	9
X101	4	3	4	4	4	5	24	1	1	1	2	1	6
X102	4	1	2	4	4	4	19	1	1	1	2	2	7
X103	5	4	5	1	1	1	17	1	1	1	5	5	13
X104	4	1	2	4	5	5	21	2	2	2	2	2	10
X105	4	1	2	4	5	5	21	2	2	2	2	2	10
X106	4	1	2	4	5	5	21	2	2	2	2	2	10
X107	4	4	4	4	5	5	26	1	2	1	2	2	8
X108	4	4	4	2	4	4	22	1	2	2	2	1	8
X109	4	2	4	2	4	4	20	2	2	2	2	2	10
X110	2	1	2	4	5	5	19	1	1	1	2	2	7
X111	5	4	5	2	5	5	26	1	2	1	3	2	9
X112	2	1	2	4	5	4	18	1	1	2	2	2	8
X113	2	1	2	4	5	4	18	1	1	2	2	2	8
X114	2	1	2	4	5	5	19	5	1	1	2	2	11
X115	3	4	2	4	4	4	21	2	2	2	2	2	10
X116	2	1	2	4	5	4	18	1	1	2	2	2	8
X117	4	3	3	3	4	5	22	1	1	1	1	1	5
X118	4	4	4	2	4	4	22	1	2	2	2	2	9
X119	5	4	5	1	4	1	20	1	1	1	1	5	9
X120	2	4	4	2	3	3	18	2	4	3	2	1	12

LAMPIRAN 4 Statistik Deskriptif Jawaban Responden

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	120	2.00	5.00	4.0167	.56484
X1.2	120	1.00	5.00	3.9417	.71356
X1.3	120	1.00	5.00	3.9333	.82740
X1.4	120	1.00	5.00	4.2667	.63157
X1.5	120	2.00	5.00	3.9667	.69733
X1.6	120	1.00	5.00	4.2000	.65594
X1	120	8.00	30.00	24.3250	2.67627
X2.1	120	1.00	5.00	4.3000	.69331
X2.2	120	1.00	5.00	3.6917	.70765
X2.3	120	1.00	5.00	4.1167	.75796
X2.4	120	1.00	5.00	4.4667	.74398
X2.5	120	2.00	5.00	4.1083	.57680
X2	120	8.00	25.00	20.6833	2.39040
X3.1	120	1.00	5.00	3.9833	.90733
X3.2	120	1.00	5.00	3.8167	.60784
X3.3	120	1.00	5.00	3.8083	.71356
X3.4	120	1.00	5.00	3.9833	.57953
X3.5	120	1.00	5.00	4.4000	.62712
X3.6	120	1.00	5.00	4.1333	.72103
X3.7	120	1.00	5.00	4.2417	.63505
X3.8	120	1.00	5.00	4.3667	.62083
X3	120	15.00	40.00	32.7333	3.09169
X4.1	120	3.00	5.00	4.2583	.45827
X4.2	120	2.00	5.00	4.2083	.51687
X4.3	120	1.00	5.00	3.7833	.67592
X4.4	120	1.00	5.00	4.2167	.71224
X4.5	120	3.00	5.00	4.1583	.51850
X4.6	120	3.00	5.00	4.1917	.53915
X4.7	120	1.00	5.00	2.7833	1.03861
X4	120	23.00	33.00	27.6000	2.24694
X5.1	120	1.00	5.00	3.3167	1.09224
X5.2	120	1.00	5.00	3.3250	1.16072
X5.3	120	1.00	5.00	3.2500	1.16135
X5.4	120	1.00	5.00	2.9000	1.08775
X5.5	120	1.00	5.00	3.8000	1.05001
X5.6	120	1.00	5.00	4.3167	.77766

X5	120	15.00	26.00	20.9083	2.43226
Y.1	120	1.00	5.00	1.5833	.76239
Y.2	120	1.00	5.00	1.6583	.70408
Y.3	120	1.00	4.00	1.4417	.61897
Y.4	120	1.00	5.00	1.8333	.66526
Y.5	120	1.00	5.00	1.8167	.97000
Y	120	5.00	15.00	8.3333	2.23544
Valid N (listwise)	120				



LAMPIRAN 5 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Correlations

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1
X1.1 Pearson Correlation	1	.294**	.182*	.341**	.129	.218*	.513**
Sig. (2-tailed)		.001	.046	.000	.159	.017	.000
N	120	120	120	120	120	120	120
X1.2 Pearson Correlation	.294**	1	.363**	.426**	.283**	.312**	.692**
Sig. (2-tailed)	.001		.000	.000	.002	.001	.000
N	120	120	120	120	120	120	120
X1.3 Pearson Correlation	.182*	.363**	1	.324**	.273**	.226*	.647**
Sig. (2-tailed)	.046	.000		.000	.003	.013	.000
N	120	120	120	120	120	120	120
X1.4 Pearson Correlation	.341**	.426**	.324**	1	.459**	.357**	.729**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
N	120	120	120	120	120	120	120
X1.5 Pearson Correlation	.129	.283**	.273**	.459**	1	.474**	.672**
Sig. (2-tailed)	.159	.002	.003	.000		.000	.000
N	120	120	120	120	120	120	120
X1.6 Pearson Correlation	.218*	.312**	.226*	.357**	.474**	1	.652**
Sig. (2-tailed)	.017	.001	.013	.000	.000		.000
N	120	120	120	120	120	120	120
X1 Pearson Correlation	.513**	.692**	.647**	.729**	.672**	.652**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	120	120	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	.327**	.509**	.541**	.233*	.773**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.010	.000
	N	120	120	120	120	120	120
X2.2	Pearson Correlation	.327**	1	.303**	.132	.371**	.617**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.151	.000	.000
	N	120	120	120	120	120	120
X2.3	Pearson Correlation	.509**	.303**	1	.588**	.086	.758**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.000	.349	.000
	N	120	120	120	120	120	120
X2.4	Pearson Correlation	.541**	.132	.588**	1	.195*	.741**
	Sig. (2-tailed)	.000	.151	.000		.033	.000
	N	120	120	120	120	120	120
X2.5	Pearson Correlation	.233*	.371**	.086	.195*	1	.507**
	Sig. (2-tailed)	.010	.000	.349	.033		.000
	N	120	120	120	120	120	120
X2	Pearson Correlation	.773**	.617**	.758**	.741**	.507**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	120	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3
X3.1 Pearson Correlation	1	.284**	.384**	.287**	.100	.016	-.037	.175	.544**
Sig. (2-tailed)		.002	.000	.001	.275	.860	.691	.056	.000
N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X3.2 Pearson Correlation	.284**	1	.112	.278**	.062	.075	.225*	-.021	.430**
Sig. (2-tailed)	.002		.223	.002	.503	.413	.014	.822	.000
N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X3.3 Pearson Correlation	.384**	.112	1	.195*	.098	.360**	.122	.160	.563**
Sig. (2-tailed)	.000	.223		.032	.289	.000	.186	.081	.000
N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X3.4 Pearson Correlation	.287**	.278**	.195*	1	.342**	.066	.445**	.414**	.631**
Sig. (2-tailed)	.001	.002	.032		.000	.476	.000	.000	.000
N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X3.5 Pearson Correlation	.100	.062	.098	.342**	1	.364**	.515**	.483**	.619**
Sig. (2-tailed)	.275	.503	.289	.000		.000	.000	.000	.000
N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X3.6 Pearson Correlation	.016	.075	.360**	.066	.364**	1	.369**	.247**	.548**
Sig. (2-tailed)	.860	.413	.000	.476	.000		.000	.007	.000
N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X3.7 Pearson Correlation	-.037	.225*	.122	.445**	.515**	.369**	1	.477**	.637**
Sig. (2-tailed)	.691	.014	.186	.000	.000	.000		.000	.000
N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X3.8 Pearson Correlation	.175	-.021	.160	.414**	.483**	.247**	.477**	1	.616**
Sig. (2-tailed)	.056	.822	.081	.000	.000	.007	.000		.000
N	120	120	120	120	120	120	120	120	120
X3 Pearson Correlation	.544**	.430**	.563**	.631**	.619**	.548**	.637**	.616**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	120	120	120	120	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4
X4.1 Pearson Correlation	1	.480**	.182*	.368**	.322**	.240**	-.040	.599**
Sig. (2-tailed)		.000	.046	.000	.000	.008	.662	.000
N	120	120	120	120	120	120	120	120
X4.2 Pearson Correlation	.480**	1	.034	.333**	.378**	.308**	-.087	.564**
Sig. (2-tailed)	.000		.712	.000	.000	.001	.343	.000
N	120	120	120	120	120	120	120	120
X4.3 Pearson Correlation	.182*	.034	1	.168	.195*	.276**	-.283**	.380**
Sig. (2-tailed)	.046	.712		.066	.033	.002	.002	.000
N	120	120	120	120	120	120	120	120
X4.4 Pearson Correlation	.368**	.333**	.168	1	.361**	.263**	-.072	.632**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.066		.000	.004	.432	.000
N	120	120	120	120	120	120	120	120
X4.5 Pearson Correlation	.322**	.378**	.195*	.361**	1	.402**	.049	.675**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.033	.000		.000	.598	.000
N	120	120	120	120	120	120	120	120
X4.6 Pearson Correlation	.240**	.308**	.276**	.263**	.402**	1	-.120	.563**
Sig. (2-tailed)	.008	.001	.002	.004	.000		.191	.000
N	120	120	120	120	120	120	120	120
X4.7 Pearson Correlation	-.040	-.087	-.283**	-.072	.049	-.120	1	.308**
Sig. (2-tailed)	.662	.343	.002	.432	.598	.191		.001
N	120	120	120	120	120	120	120	120
X4 Pearson Correlation	.599**	.564**	.380**	.632**	.675**	.563**	.308**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001	
N	120	120	120	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	X5
X5.1 Pearson Correlation	1	.435**	.547**	-.574**	-.208*	.079	.596**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.023	.392	.000
N	120	120	120	120	120	120	120
X5.2 Pearson Correlation	.435**	1	.538**	-.380**	-.298**	-.050	.615**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.001	.589	.000
N	120	120	120	120	120	120	120
X5.3 Pearson Correlation	.547**	.538**	1	-.712**	-.200*	-.023	.567**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.029	.801	.000
N	120	120	120	120	120	120	120
X5.4 Pearson Correlation	-.574**	-.380**	-.712**	1	.188*	.048	.235**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.039	.605	.010
N	120	120	120	120	120	120	120
X5.5 Pearson Correlation	-.208*	-.298**	-.200*	.188*	1	.305**	.282**
Sig. (2-tailed)	.023	.001	.029	.039		.001	.002
N	120	120	120	120	120	120	120
X5.6 Pearson Correlation	.079	-.050	-.023	.048	.305**	1	.473**
Sig. (2-tailed)	.392	.589	.801	.605	.001		.000
N	120	120	120	120	120	120	120
X5 Pearson Correlation	.596**	.615**	.567**	.235**	.282**	.473**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.010	.002	.000	
N	120	120	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y
Y.1 Pearson Correlation	1	.515**	.375**	.127	.055	.669**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.167	.551	.000
N	120	120	120	120	120	120
Y.2 Pearson Correlation	.515**	1	.465**	.057	-.068	.607**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.538	.461	.000
N	120	120	120	120	120	120
Y.3 Pearson Correlation	.375**	.465**	1	.160	.052	.621**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.081	.573	.000
N	120	120	120	120	120	120
Y.4 Pearson Correlation	.127	.057	.160	1	.369**	.563**
Sig. (2-tailed)	.167	.538	.081		.000	.000
N	120	120	120	120	120	120
Y.5 Pearson Correlation	.055	-.068	.052	.369**	1	.555**
Sig. (2-tailed)	.551	.461	.573	.000		.000
N	120	120	120	120	120	120
Y Pearson Correlation	.669**	.607**	.621**	.563**	.555**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
N	120	120	120	120	120	120

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Uji Reliabilitas

X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.760	7

X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.772	6

X3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.734	9

X4

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.683	8

X5

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.641	7

Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.729	6



LAMPIRAN 6 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.85389821
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.100
	Negative	-.070
Test Statistic		.100
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

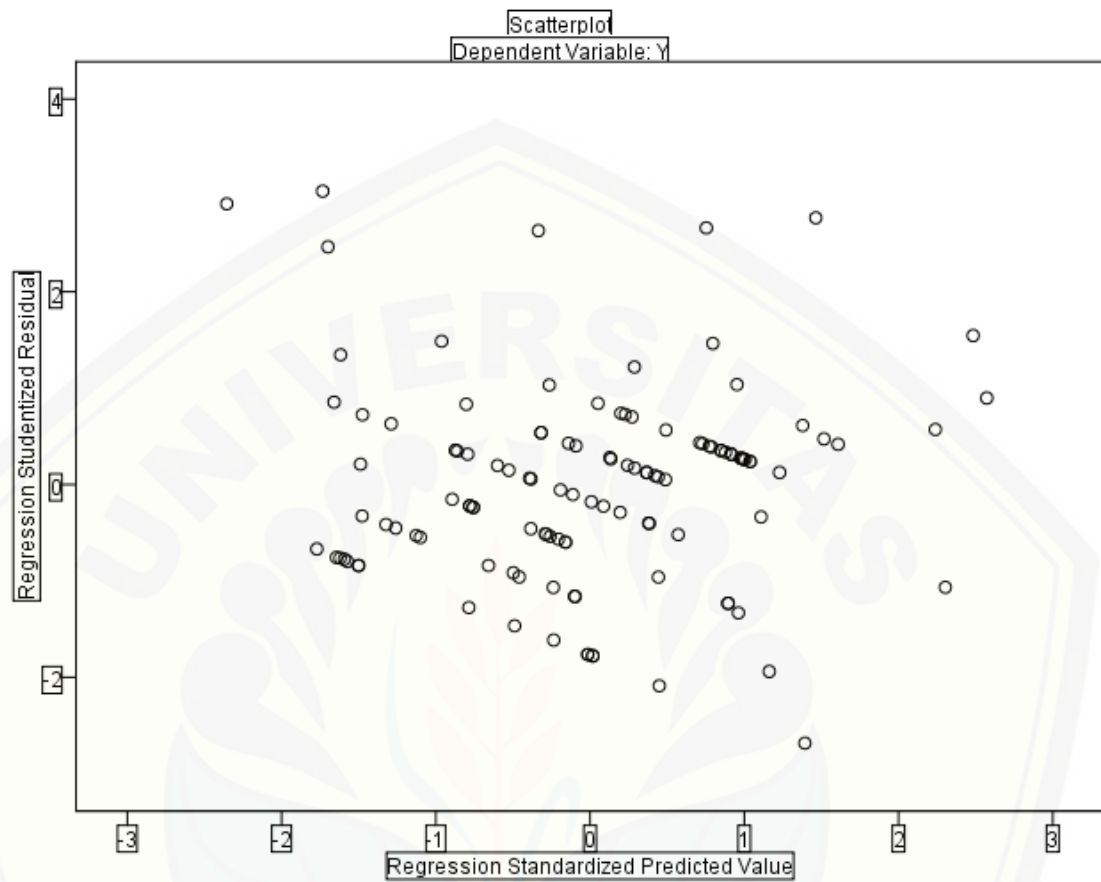
- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

b. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.040	.082		.490	.625		
X1	-.019	.095	-.018	-.197	.844	.757	1.321
X2	-.372	.089	-.378	-4.156	.000	.772	1.295
X3	-.196	.093	-.086	-2.027	.037	.918	1.089
X4	-.040	.088	-.044	-.461	.646	.699	1.431
X5	-.264	.097	-.254	-2.713	.008	.727	1.375

- a. Dependent Variable: Y

c. Uji Heteroskedastisitas

LAMPIRAN 7 Analisis Regresi**a. Regresi Linier Berganda****Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.520 ^a	.271	.239	.87242310

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X1, X2, X4

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	32.232	5	6.446	8.470	.000 ^b
	Residual	86.768	114	.761		
	Total	119.000	119			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X5, X3, X1, X2, X4

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.040	.082		.490	.625
	X1	-.019	.095	-.018	-.197	.844
	X2	-.372	.089	-.378	-4.156	.000
	X3	-.196	.093	-.086	-2.027	.037
	X4	-.040	.088	-.044	-.461	.646
	X5	-.264	.097	-.254	-2.713	.008

a. Dependent Variable: Y

b. Moderated Regression Analysis (MRA)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.758 ^a	.575	.540	.67804516

a. Predictors: (Constant), X4.X5, X5, X4, X2, X3, X1, X3.X5, X1.X5, X2.X5

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	68.428	9	7.603	16.538	.000 ^b
	Residual	50.572	110	.460		
	Total	119.000	119			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4.X5, X5, X4, X2, X3, X1, X3.X5, X1.X5, X2.X5

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.009	.064		.138	.890
	X1	-.282	.171	-.273	-1.652	.101
	X2	-.453	.081	-.460	-5.605	.000
	X3	-.282	.116	-.253	-2.427	.017
	X4	-.146	.116	-.159	-1.261	.210
	X5	-.294	.086	-.284	-3.429	.001
	X1.X5	-.019	.169	-.019	-.115	.908
	X2.X5	-.698	.282	-.698	-2.475	.015
	X3.X5	-.821	.161	-.821	-5.099	.000
	X4.X5	-.283	.210	-.283	-1.350	.180

a. Dependent Variable: Y

LAMPIRAN 8 R Tabel

N	The Level of Significance		N	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081